

**PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN KARST  
UNTUK PENDAPATAN PEMERINTAH DESA**

(Studi Pada Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**ZAKARIA FIRMANDA**

**0910310332**



**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2015**

## MOTTO

There is a pleasure in the pathless woods

There is a rapture on the lonely shore

There is society, where none intrudes

By the deep sea and music in its roar

I love not man the less, but nature more

Lord Byron

Jadilah orang yang bermanfaat, walaupun itu hanya di sekitarmu. Setelah ini ku lanjutkan perjalanan...





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengelolaan Potensi Kawasan Karst Untuk Pendapatan Pemerintah Desa (Studi  
Pada Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang)  
Disusun Oleh : Zakaria Firmanda  
Nim : 0910310332  
Fakultas : Ilmu Administrasi  
Jurusan : Administrasi Publik  
Konsentrasi : -

Malang, 31 Juli 2015

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

Sarwono, Dr. M.Si  
NIP. 195709091984031002

Imam Hanafi, Dr. M.Si, MS  
NIP. 19691002 199802 1 001





**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi, fakultas ilmu administrasi universitas brawijaya, pada:

Hari : selasa  
 Tanggal : 18 agustus 2015  
 Jam : 11:00 WIB  
 Skripsi ata nama : Zakaria Fiemanda  
 Judul : **PENGELOLAAN POTENSI KAWASAN KARS' UNTUK PENDAPATAN PEMERINTAH DESA** (Studi Pada Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang)

Dan dinyatakan lulus

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua



Dr. Sarwono, M.Si

NIP. 19570901984031002

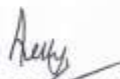
Anggota



Dr. Imam Hanafi, MSi, Ms

NIP.196910021998021001

Anggota



Dr. Lely Indah Mindarti, MSi

NIP. 196905242002122002

Anggota



Moh. Said S.Sos. MAP

NIP.196905242002122002



**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini, dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 18 Juni 2015



TT  
Nama : Zakaria Firmanda  
NIM : 0910310332

## RINGKASAN

Zakaria Firmanda, 2015, **Pengelolaan Potensi Kawasan Karst Untuk Pendapatan Pemerintah Desa** (Studi Pada Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang) Jurusan Administrasi Publik, Ketua: Sarwono. Dr, M.Si , Anggota : Imam Hanafi, Dr, M.Si, MS

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kawasan karst yang tersebar di hampir semua pulau-pulau besar dari Sumatra sampai Papua. Di Indonesia akhir-akhir kawasan karst ini dianggap memiliki nilai-nilai yang sangat strategis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan apa yang mendasar pada pengelolaan dan pemanfaatan potensi karst di kawasan kabupaten malang, khususnya di Desa Banjarejo. Pemanfaatan yang berlebihan mengakibatkan kerusakan yang cukup serius apabila tidak segera ditangani secara cepat, pemanfaatan kawasan karst tidak hanya bernilai ekonmi tinggi namun disisi lain pemanfaatan kawasan dapat dikelola secara maksimal dengan melihat nilai ekonomi tinggi serta melihat sisi ekologi lingkungan yang didapat. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “Pengelolaan Potensi Kawasan Karst Untuk Pendapatan Pemerintah Desa (Studi Pada Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi desa banjarejo serta peran pemerintah desa dan daerah dalam pemanfaatan serta pengelolaan yang berdasarkan ekologi lingkungan untuk pendapatan pemerintah desa.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif untuk memperoleh data potensi serta peran penting pemerintah dalam pelestarian dan pengelolaan kawasan karst. Pengelolaan kawasan karst yang masih kurang dirasa menyebabkan ketergantungan desa Banjarejo ini terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan yang masih minim dirasa pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan karst malang hendaknya perlu dikembangkan oleh sumberdaya manusia sekitar serta Pemerintah Kabupaten Malang mengingat banyak problema terkait dalam konservasi sumberdaya alam, namun hingga kini masih belum terealisasi dan manfaat dari fungsi pemerintahan terhadap pengelolaan kawasan karst secara lestari.



## SUMMARY

Zakaria Firmanda, 2015, **the Management Potential To Karst Village Government Revenue (Studies in Desa Banjarejo, District Donomulyo, Malang)** Department of Public Administration, Chairman: Sarwono. Dr, M.Si, Members: Imam Hanafi, Dr, M.Si, MS

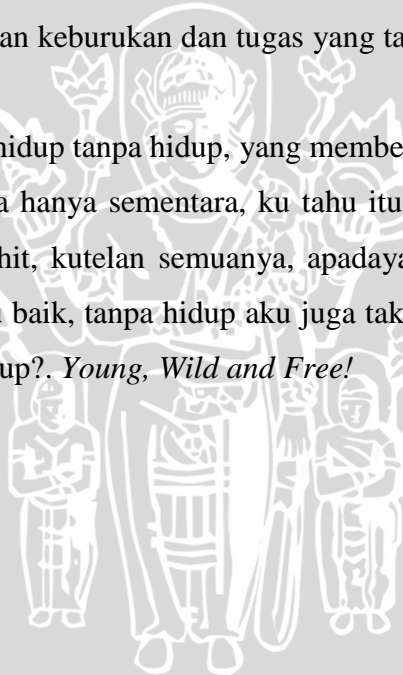
Indonesia is an archipelago that has a karst area are scattered in almost all the major islands of Sumatra to Papua. In Indonesia lately karst region is considered to have values that are very strategic. This study was conducted to determine what is the fundamental problem in the management and utilization of karst in the poor districts, especially in Desa Banjarejo. Excessive utilization resulted in a fairly serious damage if not treated quickly, the utilization of karst region are not only high-value but on the other hand ekonmi area utilization can be managed optimally with a look of high economic value and look at the ecological environment obtained. Therefore this research entitled "Management of Potential Karst For Village Government Revenue (Studies in Desa Banjarejo, District Donomulyo, Malang)". This study aims to determine the potential Banjarejo village and the village and local government's role in the utilization and management based on ecological environment for the village government revenue.

In this study, researchers used a descriptive study through a qualitative approach to obtain data on the potential and important role of government in the preservation and management of karst region. Karst area management is still lacking considered addictive Banjarejo village is on revenue. Revenues are still minimal felt natural resource management and human resources. Therefore, the poor management of karst areas should be developed by the human resources around and Malang Regency Government given the many problems related to the conservation of natural resources, but until now had not been realized and the benefits of government functions to the sustainable management of karst region.

## LEMBAR PERSEMBAHAN

“Tuhan” tak ada lagi yang kuhembus pertama kali dinafas untuk persembahan tulisan skripsi ini. Kau maha pencipta alam semesta, maha segalanya yang memiliki kekuasaan atas apa-pun. Terimakasih hanya kepadamu-lah aku berdo’a dan mencarimu setiap waktu dan berucap. Kau telah memberi wawasan dan pengetahuan di otak-ku, memberi apapun yang ada disekitar. Tanpa Tuhan apa artinya hidup dan kehidupan. Yah, percakapanku dengan mu mungkin tak kunjung usai ketika ku bertanya-tanya akan makna dirimu, makna kebenaran didunia. Tuhan ku kau memang baik, tak kuasa aku membalas kebaikanmu, walaupun kadang kau berikan keburukan dan tugas yang tak bisa ku kerjakan, apa daya.

Hidup, ku tak bisa hidup tanpa hidup, yang memberikan kehidupan berarti dan tidak berarti, semuanya hanya sementara, ku tahu itu. Kau beri pengalaman manis dan begitu juga pahit, kutelan semuanya, apadaya memang aku mampu untuk itu. Hidup kau begitu baik, tanpa hidup aku juga tak akan hidup. Hei hidup bisakah kau untuk tidak hidup?. *Young, Wild and Free!*





## UCAPAN TERIMAKASIH

Kedua orang tua ku (Badrus sholeh dan Nurul Mabubah) yang sampai saat ini bertahan untuk hidup dan menghidupiku, dan tak bosan kau pedulikan anakmu ini. Kau ajarkan perilaku dan kehidupan dengan baik seperti halnya api yang tak kunjung padam, kalian pertaruhkan harapan pada anakmu ini. Mungkin ku tak mampu untuk membalas kebaikanmu hingga saat ini, dan yang kumengerti, aku masih menjadi parasit kalian berdua. Dan tak lupa pula ketiga saudaraku Novidarismayasari dan Aditya Afandi, begitu juga dengan Dian di kehidupan serba pelik.

Terimakasih untuk diriku “**Zakaria Firmanda**”. Aku bertanya-tanya pada mu, hey kawan!, banyak angan yang kau impikan. Untuk saat ini masih belum tersampaikan, namun sabar dan bersabarlah. Jangan tunggu, namun kejarlah di depan mu. Tersampaikan atau tidak, itu urusan nanti.

IMPALA UB (Ikatan Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Brawijaya), dan rekan-rekan anggota atribut “Oranye” yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, solidaritas tanpa batas dan ilmu yang tak ternilai.

Rekan-rekan dan para rival-rivalku Genk-Gank SBHPS terimakasih atas segalanya!

Terakhir, terimakasih para penganut sayap kiri dan para veteran FIA UB (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya) angkatan 2009. Mari kita tinggalkan bangku kelabu, dengan kelulusan ini, mari kita bersulang!

## KATA PENGANTAR

Penyusunan penelitian skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat perkuliahan di Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Sejak awal sampai dengan akhir penulisan ini, tidak sedikit bantuan yang saya terima. Dan kesempatan ini saya ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Drs. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik universitas Brawijaya.
4. Bapak Sarwono, Dr, M.Si Ketua Komisi Pembimbing selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan kritik dan saran.
5. Bapak Imam Hanafi Dr, M.Si Anggota Komisi Pembimbing MS, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan kritik dan saran.
6. Ibu Suliyah dan Bapak Priyono selaku pembimbing penelitian skripsi lapangan (Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang) yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik dan saran kepada saya.

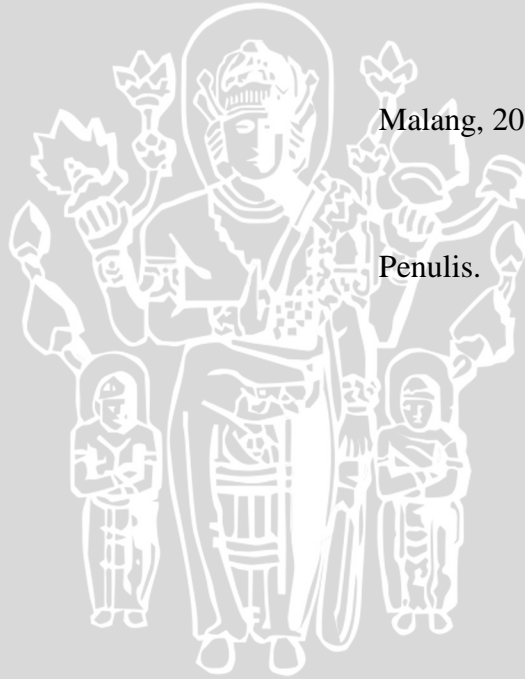
7. Warga Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, yang telah banyak memberikan informasi, bimbingan, kritik dan saran kepada saya.

8. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Demi baiknya penelitian skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 20 Oktober 2015

Penulis.





DAFTAR ISI

MOTTO .....	i
TANDA PERSETUJUAN .....	ii
TANDA PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPSI .....	iv
RINGKASAN .....	v
SUMMARY .....	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	vii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Sistematika Pembahasan .....	13
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Administrasi Publik Dan Fungsi Administrasi Publik.....	16
B. Peran Pemerintah.....	18
C. Pemerintah Dan Wewenanganya .....	21
D. Pemerintah Desa Dan Kewenangannya .....	27
E. Pendapatan Asli Desa .....	29
F. Karst.....	31
1. Pengertian.....	31
2. Potensi Karst .....	34
3. Konservasi/Pelestarian Karst .....	37
4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pngelolaan Kawasan Karst.....	39
5. Pengelolaan Kawasan Karst Di Era Otonomi Daerah.....	42
6. Kawasan Karst Di Indonesia.....	46
7. Ekowisata Karst Di Indonesia.....	49
8. Dasar Pengelolaan Karst Di Indonesia.....	50
G. Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development</i> ) .....	53

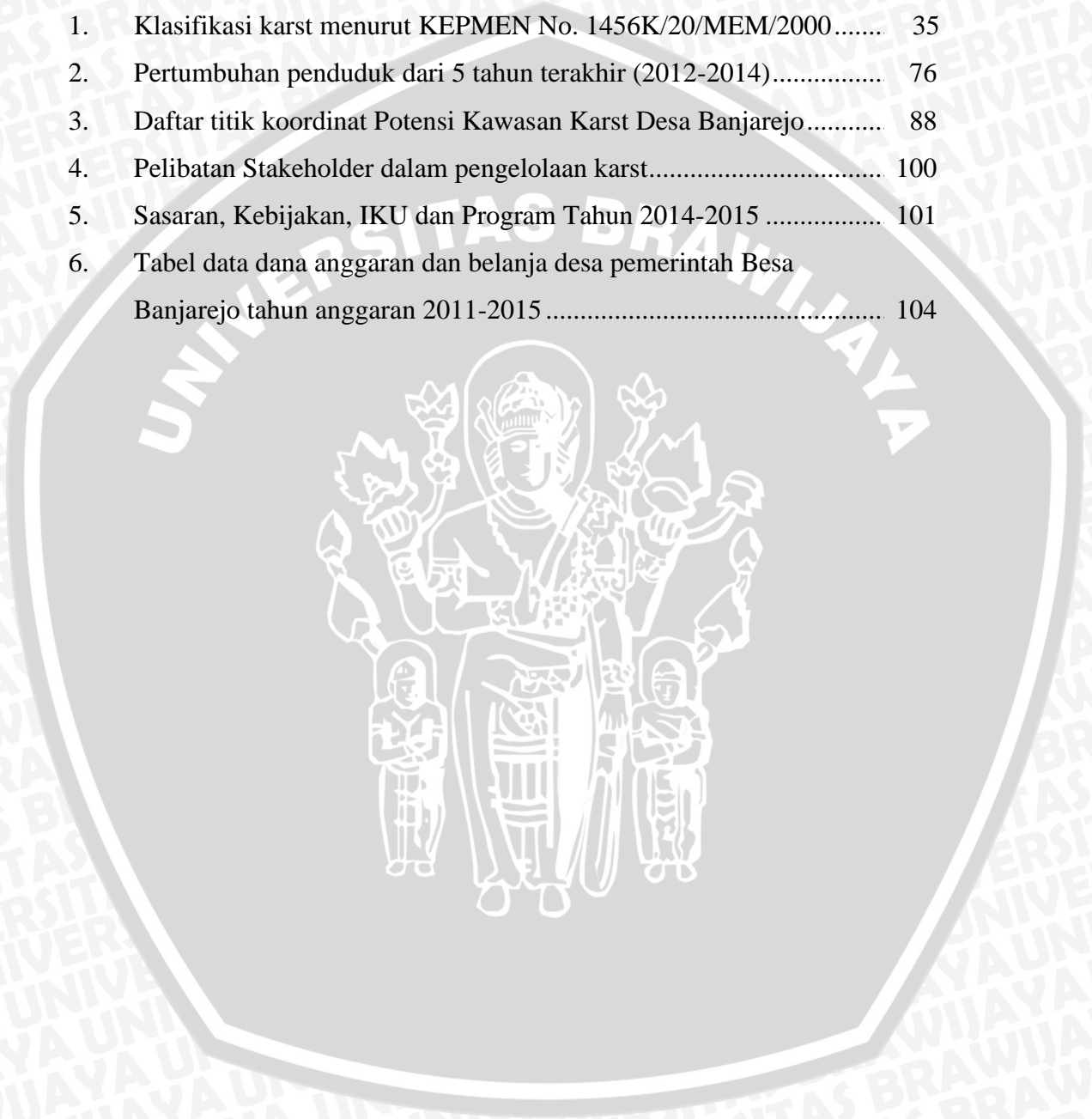


1. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.....	55
2. Strategi Pembangunan Berkelanjutan .....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Fokus Penelitian .....	63
C. Lokasi Dan Situs Penelitian .....	63
D. Sumber Data.....	64
E. Instrumen Penelitian .....	64
F. Pengumpulan Data .....	65
G. Keabsahan Data.....	67
H. Analisis Data .....	68
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Dan Situs Penelitian .....	71
1. Sejarah Desa Banjarejo .....	71
2. Visi Dan Misi Kabupaten Desa Banjarejo .....	72
3. Keadaan Lokasi Penelitian.....	74
4. Situs Penelitian.....	76
5. Keadaan Wilayah Karst Banjarejo .....	79
B. Data Fokus Penelitian.....	84
1. Pendataan Potensi Kawasan Karst Di Desa Banjarejo.....	84
2. Langkah Langkah Yang Dilakukan Pemerintah Desa Dan Pemerin- Tah Dalam Pengelolaan Potensi Kawasan Karst Secara Lestari .....	90
C. Analisa Data Dan Pembahasan.....	103
1. Kajian Dan Analisis Pengelolaan Kawasan Karst Desa Banjarejo	103
2. Fator Yang Mempengaruhi Dalam Pengelolaan Potensi Desa Ban- Jarejo .....	105
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	112
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR TABEL**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Hal</b>
1.	Klasifikasi karst menurut KEPMEN No. 1456K/20/MEM/2000.....	35
2.	Pertumbuhan penduduk dari 5 tahun terakhir (2012-2014).....	76
3.	Daftar titik koordinat Potensi Kawasan Karst Desa Banjarejo.....	88
4.	Pelibatan Stakeholder dalam pengelolaan karst.....	100
5.	Sasaran, Kebijakan, IKU dan Program Tahun 2014-2015 .....	101
6.	Tabel data dana anggaran dan belanja desa pemerintah Besa Banjarejo tahun anggaran 2011-2015 .....	104





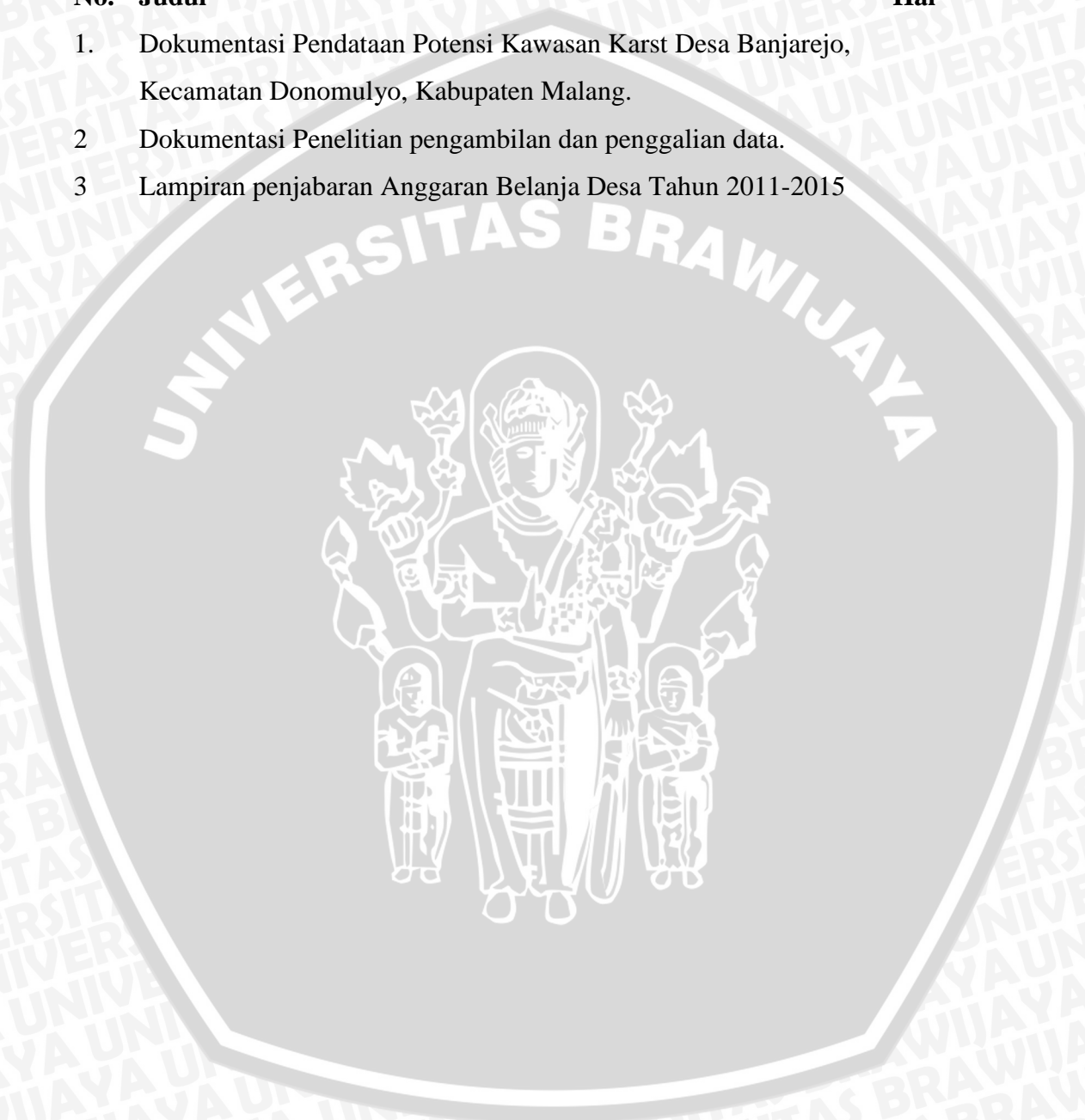
**DAFTAR GAMBAR**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Hal</b>
1.	Peta sebaran Karst di Indonesia.....	46
2.	Alur skema analisis data.....	69
3.	Peta Geologi Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.....	79
4.	Fosil cangkang siput penyusun batugamping.....	80
5.	Fosil terumbu karang/koral penyusun batugamping.....	81
6.	Bukit kerucut dan bukit memanjang merupakan area karst.....	82
7.	Peta geologi Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.....	84
8.	Potensi dan pendataan.....	89



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal
1.	Dokumentasi Pendataan Potensi Kawasan Karst Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.	
2.	Dokumentasi Penelitian pengambilan dan penggalian data.	
3.	Lampiran penjabaran Anggaran Belanja Desa Tahun 2011-2015	







## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perhatian terhadap potensi kawasan karst dan guanya dari sisi non ekonomi mulai meningkat beberapa tahun terakhir, namun kemauan untuk perlindungan yang menyeluruh belum juga terwujud menurut Rahmadi (2007).

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kawasan karst yang tersebar di hampir semua pulau-pulau besar dari Sumatra sampai Papua. Di Indonesia akhir-akhir kawasan karst ini dianggap memiliki nilai-nilai yang sangat strategis. Selain karena mencakup hampir 20% (dua puluh persen) luas dari total seluruh wilayah di Indonesia, karst memiliki potensi yang bukan saja unik tetapi juga sangat kaya dengan sumber daya alam baik itu hayati maupun non hayati, menurut Himpunan Kegiatan Speleologi Indonesia/HIKESPI (2005).

Sejak tahun 1994 sudah ditetapkan mengenai bentang alam karst, kini mulai banyak manusia memanfaatkan alam tersebut demi kepentingan pembangunan. Salah satu penyebabnya ialah bagaimana pemerintah mampu menangani masalah yang ada seperti penambangan batu gamping secara terus menerus tanpa melihat kondisi ekologi yang ada disekitar kawasan. Topografi karst merupakan bentang alam yang mudah dikenali oleh semua orang. Karst adalah laboratorium dan ekosistem yang perlu dijaga kelestariannya. Karst berasal dari bahasa Yugoslavia, *kras* yang kemudian diadaptasikan dalam bahasa Jerman, yang berarti tempat tanpa air dan dingin, juga berkonotasi permukaan batuan

gundul. Karst adalah suatu bentang alam yang umumnya dibentuk oleh batu gamping, yang dicirikan oleh hadirnya cekungan-cekungan tertutup; kubah-kubah; gua-gua dengan berbagai ukuran; aliran permukaan yang terganggu; serta sistem pengasatan bawah permukaan, menurut Kusumayudha (2005:157).

Morfologi karst sangat spesifik, yaitu terdiri dari serangkaian bukit bukit berbentuk kerucut, kubah, atau tiang. Diantara kubah-kubah tersebut biasanya dijumpai cekungan-cekungan seperti mangkok yang kadang-kadang berisi air. Selain menyimpan air, karst juga menyediakan sumber daya alam lain, berupa flora dan fauna, batu gamping sebagai bahan galian. Potensi lain yang disediakan oleh karst untuk manusia yaitu pemandangan yang indah.

Kawasan karst di Indonesia khususnya di pulau Jawa telah lama dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan ekonomi seperti; pemukiman penduduk, pertanian/peternakan, perkebunan, kehutanan, penambangan batu gamping, penambangan guano, penyediaan air bersih, air irigasi dan perikanan, serta kepariwisataan. Berbagai bentuk pemanfaatan kawasan karst tersebut yang paling banyak mengakibatkan perubahan kawasan karst adalah penambangan batu gamping baik dalam skala besar maupun skala kecil. Adapun keuntungan yang diperoleh dari pengembangan kawasan karst menjadi objek wisata adalah mampu mendatangkan tambahan pendapatan, tanpa kehilangan fenomena alam karst dan tidak seperti halnya dengan penambangan batu gamping untuk bahan bangunan, menurut Ko MD DV (2004).

Salah satu contoh pemanfaatan karst yang terpadu seperti di pegunungan Gunung Sewu Jogja, Jawa Tengah. Pemanfaatan lahan karst difungsikan lebih



bernilai ekonomi tinggi dari pada penggunaan untuk suatu perusahaan tambang batu untuk produksi semen. Berbeda dengan pemanfaatan kawasan karst di wilayah Kabupaten Malang (Wilayah Karst Kendeng), daerahnya masih banyak permasalahan sosial dan ekonomi. Pengelolaan pemanfaatan kawasan karst masih belum menunjukkan hasil yang diinginkan oleh pemerintah daerah, malahan kawasan karst dinilai kawasan yang kering dan bernilai ekonomi rendah, padahal banyak potensi sumberdaya alam yang terdapat didalamnya.

Menurut salah satu sumber media online yakni ([www.greenermagz.com](http://www.greenermagz.com)), ada beberapa poin yang dijelaskan, yakni: Kepala kantor penanaman modal pemerintah kabupaten Malang, Kukuh Banendro, mengatakan, “PT Senopati Dirgantara Perkasa dengan menggandeng investor asing dan domestik siap menggelontorkan investasi Rp 3-4 triliun untuk membangun pabrik semen di Malang”. Menurutnya, investor berminat membangun pabrik semen karena terdapat ribuan hektare bahan baku semen di Malang Selatan yang merupakan kawasan karst. Selain PT Senopati, kata Kukuh, Grup Bosowa juga berminat membangun pabrik semen yang pada tahun 2007 lalu hendak berinvestasi Rp 1,5 triliun sampai Rp 2 triliun.

Sementara itu, hasil studi kelayakan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) dan Badan Lingkungan Hidup Malang (BLH) pada bulan April-Desember 2005 lalu. Diperkirakan potensi bahan baku semen yang terdapat di Kabupaten Malang sebanyak 60 miliar meter kubik. Semua potensi bahan semen di Malang bisa ditambang selama 600 tahun, dengan asumsi



eksplorasi dua juta meter kubik per tahun. “Sementara yang bakal ditambang hanya 25 miliar meter kubik,” katanya.

Ikatan Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Brawijaya (IMPALA UB), pernah melakukan pendataan jumlah gua di kawasan Kecamatan Donomulyo dan sekitarnya pada tahun 2012 lalu, terdapat 56 atau lebih (gua dan sumber mata air) yang berada di kawasan karst yang masuk di wilayah Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo. Menurut Imron Fauzi (IMPALA UB), karst di selatan Jawa Timur membentang dari Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Hingga Ke Wonogiri dan Gunung Kidul. Sementara di wilayah timur, karst ada di Banyuwangi. Sedangkan di utara berada di Tuban, Bojonegoro hingga Gresik. “Sayangnya, banyak kawasan karst yang rusak dan gersang,” ucapnya.

Dewan daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur (Purnawan D Negara) selaku peneliti dewan daerah, mengatakan bahwa rencana pembangunan pabrik semen di wilayah Kabupaten Malang serta adanya jalur lintas selatan merupakan bentuk ancaman nyata kerusakan kawasan karst di Kabupaten Malang. “Kawasan karst merupakan kawasan lindung yang harus tetap dijaga”. Purnawan menegaskan, kawasan karst terbentuk selama ribuan tahun, bahkan pembentukan stalaktit dan stalakmitnya berkisar antara 1-2 milimeter setiap 10 tahunnya. Karena itu, jika jalur lintas selatan nanti sudah jadi, maka akses perekonomian bagi pertambangan semakin terbuka, demikian bagi para wisatawan yang jika tidak dikendalikan bisa merusak gua-gua di kawasan karst. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) juga meminta pihak pemerintah Kabupaten Malang lebih bijak dan konsisten dengan tata ruangnya.

Sebagaimana pula dijelaskan pada “Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst” Bab II pasal 2 ayat a, b dan c, yang berbunyi:

“Melindungi kawasan bentang alam karst yang berfungsi sebagai pengatur alami tata air, melestarikan kawasan bentang alam karst yang memiliki keunikan dan nilai ilmiah sebagai objek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan mengendalikan pemanfaatan kawasan bentang alam karst”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Potensi desa dibagi menjadi 2 macam yaitu potensi fisik yang meliputi, tanah air, iklim dan cuaca, flora dan fauna. Serta potensi Non-Fisik, meliputi; masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial desa, dan aparatur desa, jika potensi dimanfaatkan dengan baik, desa akan berkembang dan desa akan memiliki fungsi, bagi daerah lain maupun bagi kota. Desa merupakan unit terpenting atas kemajuan dan pembangunan negara, tanpa desa yang maju maka tataran negara pun tidak bisa dikatakan maju.

Kecamatan Donomulyo terletak antara  $112^{\circ} 23' 30''$  –  $112^{\circ} 29' 64''$  BT dan  $08^{\circ} 16' 75''$  –  $08^{\circ} 19' 81''$  LS berbatasan sebelah utara kecamatan Kalipare dan Pagak, sebelah timur dengan Kecamatan Bantur, sebelah selatan Samudera Hindia, sebelah barat Kabupaten Blitar. Dengan Luas Wilayah  $192,60 \text{ Km}^2$  (6,47% luas Kabupaten Malang  $3.347,8 \text{ Km}^2$ ). Wilayah ini berada di ketinggian



antara 0-400 Mdpl (Meter di Atas Permukaan Laut) dengan suhu udara rata-rata 20° - 33° Celcius. Kecamatan dimana yang memiliki 10 desa, merupakan kecamatan yang memiliki potensi alam yang berlimpah, dan salah satunya dari 10 desa yang berada di kecamatan ini adalah desa Banjarejo.

Secara geografis Desa Banjarejo terletak di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa Banjarejo merupakan bagian dari pegunungan selatan Jawa Timur bagian yang berada di wilayah Kabupaten Malang yang berbatasan sebelah utara Desa Sumbermanjing Kulon, sebelah selatan berbatasan Samudera Indonesia, sebelah barat Desa Kedung Salam serta sebelah timur berbatasan dengan Desa Tulungrejo. Desa ini memiliki luas wilayah 2.166 HA serta memiliki 4 dusun, yakni Krajan, Putukrejo, Sumberceleng, dan Nampurejo.

Dengan topografi dan bentang lahan dengan luas pemukiman 298 HA, ladang dan perbukitan tandus 557 HA, luas lahan persawahan 215 HA serta sisanya 1.107 HA adalah hutan negara dan hutan rakyat. Desa ini masih sangat bergantung pada asupan pembelanjaan dan pengeluaran daerah mengingat perolehan pendapatan desa ini pada tahun 2014 adalah Rp. 1.165.750.000,- dan Pendapatan Asli Desa Rp. 317.000.000,- berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banjarejo Nomor : 143/05/429.621.021/2014 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2014.

Terlihat bahwa pengelolaan potensi-potensi menghasilkan pendapatan desa yang masih rendah dan masih bergantung pada Anggaran Pembelanjaan Dan Pengeluaran Daerah (APBD) untuk pembangunan Desa Banjarejo.



Desa Banjarejo ini adalah salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Didukung oleh pra riset peneliti wawancara kepada sekretaris Desa Banjarejo, yaitu Bapak Priyono:

“Desa Banjarejo memiliki banyak potensi sumber daya alam yang cukup banyak, seperti potensi hutan rakyat, potensi sumber mata air dan guanya yang cukup bagus dan potensi pantai bantol yang cukup bagus dan masih banyak yang lain, namun kendala utama disini adalah penunangan infrastruktur seperti jalan dan tempat umum lainnya”.

(wawancara pada tanggal 7 Oktober 2014 di kantor desa Banjarejo).

Uraian penjelasan menurut bapak bapak Priyono, telah menguatkan bahwasannya potensi yang ada di desa Banjarejo ini cukup besar, desa dimana terletak di kecamatan Donomulyo ini. Desa ini mempunyai pendapatan asli desa yang rendah, didukung dengan pra riset peneliti yang mewawancarai sekretaris desa yaitu Bapak Priyono:

“Desa Banjarejo termasuk salah satu desa di kecamatan donomulyo yang memiliki pendapatan asli desa yang rendah. Karena tidak maksimalnya pengelolaan potensi daerahnya untuk diolah dan dijadikan objek pendapatan desa”.

(wawancara pada tanggal 7 Oktober 2014 di kantor desa Banjarejo).

Uraian tersebut mendukung bahwasannya Desa Banjarejo termasuk desa yang memiliki pendapatan asli desa yang rendah. Namun di sisi lain, sesungguhnya desa Banjarejo memiliki banyak potensi yang dijadikan sebagai objek wisata maupun kemakmuran untuk masyarakat dan pendapatan desa. Desa ini memiliki potensi yang begitu banyak dari sisi pertanian, perkebunan, mata air kelautan dan pariwisata. Potensi Desa Banjarejo meliputi potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia. Potensi sumber daya alam desa ini

memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah, antara lain meliputi perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan dan bahan galian, pariwisata, industri kecil/kerajinan dan industri besar/menengah.

Sumber mata air di Desa Banjarejo ini masih bergantung pada air di sumur, memang benar saat musim penghujan sumur warga penuh dengan air, namun pada saat musim panas datang warga desa ini sulit untuk mendapatkan air. Padahal, air yang berada dibawah tanah dan sumber mata air serta gua cukup apabila dipergunakan oleh penduduk 7.711 jiwa ini. Pemanfaatan sumber mata air dirasa masih belum optimal, dengan pemakaian teknologi yang masih tradisional yakni dengan menggunakan pipa untuk disalurkan kepada warga. Potensi sumberdaya ini pun juga dapat dimanfaatkan sebagai irigasi pertanian dan perkebunan di wilayah ini, mengingat warga desa sangat membutuhkan air untuk bertani. Berikut adalah uraian wawancara pada salah satu rumah warga di Dusun Sumberceleng dan sekaligus *basecamp* para penelusur gua (*caver*), yakni bapak Marsawi:

“Kalau di desa ini pada musim kemarau sulit mendapatkan air, biasanya air mudah didapat, disumur pun air penuh kalau musim penghujan. Orang disekitar sini mengandalkan Gua Lowo dan Ampat kalau musim kering datang”.

(wawancara pada tanggal 8 Oktober 2014 di dusun Sumber Celeng, desa Banjarejo).

Salah satu wilayah yang dikenal masyarakat luas sebagai daerah yang selalu kekurangan air terutama pada musim kemarau. Padahal curah hujan rata-rata di seluruh wilayah ini termasuk cukup, yaitu +2300 Mm/Th menurut Kusumayudha (2005:2).



Uraian tersebut dapat menguatkan untuk beberapa potensi yang ada, namun masih belum optimal pemanfaatannya. Padahal disisi lain potensi sumber mata air dan gua sangat vital kegunaanya bagi masyarakat sekitar, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, irigasi sawah dan pertanian lainnya. Desa yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, selayaknya kebutuhan primer mereka haruslah bisa terpenuhi. Beberapa sumber mata air dan gua masih ada di desa Banjarejo ini, potensi yang perlu dilestarikan dan dikembangkan demi kelangsungan hidup masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Gua Lowo dan Ampat adalah beberapa gua yang berair dan memiliki keindahan ornamen didalamnya.

Potensi pariwisata gua dan pantai di Desa Banjarejo memiliki aset desa kurang lebih berupa 12 gua dan 2 pantai serta potensi wisata alam lainnya seperti *conical hills* atau yang disebut juga dengan bukit berjajar, yakni Pantai Bantol dan Kondang Iwak yang berbatasan dengan Desa Tulungrejo. Pemanfaatan wisata alam ini masih belum optimal mengingat data pendapatan asli Desa Banjarejo ini masih sangat minim, bisa dikatakan pendapatan dari sektor wisata alam ini masih nol rupiah dari sektor ini. Sebagaimana hasil wawancara kepada Bapak Priyono selaku sekretaris Desa Banjarejo:

“Potensi Pantai Bantol yang cukup bagus dan masih banyak yang lain seperti gua, namun kendala utama disini adalah penunjang infrastruktur yaitu jalan, mungkin apabila infrastrukturnya sudah memenuhi, bisa dioptimalkan potensi desa ini.”

(wawancara pada tanggal 7 Oktober 2014 di kantor Desa Banjarejo).

Seharusnya potensi ini dapat dikembangkan apabila prasarana yang mendukung untuk pengembangan objek alam ini. Potensi Pantai Bantol masih



belum dimanfaatkan dengan baik sebagai salah satu tempat wisata demi menunjang pendapatan asli desa. Gua sebagai salah satu wisata alam dan edukasi nampaknya masih belum pula dimanfaatkan oleh pemerintah Desa Banjarejo. Padahal wisata alam dan edukasi kini mulai marak dikalangan masyarakat luas.

Potensi pertanian dan perkebunan erat kaitannya dengan kebutuhan air untuk memenuhinya, sebagian besar warga bermata pencaharian sabagai petani dan penambang batu gamping. Hasil potensi pertanian masyarakat Desa Banjarejo sebagian besar adalah penghasil ketela pohon, dan hampir di lahan pertanian warga didominasi oleh tanaman ketela pohon, dengan alasan tanaman yang mudah dirawat dan tidak membutuhkan perhatian khusus. Namun harga jual pangan ini yang sangat murah atau bisa disebut bernilai ekonomi rendah. Masyarakat masih belum mampu untuk pengelolaan sebagai bahan setengah jadi maupun bahan jadi, mampu sebagai petani penghasil bahan mentah. Serta perternakan di desa ini belum dikembangkan secara baik, seharusnya dengan wilayah yang luas dan potensi yang ada dipertanian dapat dimanfaatkan pula terhadap peternakan.

Penambangan batu gamping, sebagian besar warga Desa Banjarejo ini juga ekerja sebagai penambang batu gamping yang mana cara untuk mendapatkannya masih tradisional, sebagian besar penambang batu gamping ini memproduksi sebagai industri dan usaha rumahan dan menjual hasil kepada masyarakat umum. Penambangan batu kapur memang tidak seharusnya dilakukan secara terus menerus, karena batuan kapur merupakan daerah resapan air, dan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Memang pemanfaatan batu

gamping atau kapur masih dilema, mengingat kebutuhan masyarakat kawasan tersebut sangat mendesak dan sebagai bahan dasar pembuatan suatu bangunan. Ini semakin dikuatkan dari beberapa orang yang telah diwawancarai (Pra riset) yaitu Bapak Ponidi selaku penambang batu gamping dikawasan Dusun Sumber Celeng desa Banjarejo:

“Kalau penghasilan kami disini ya bertani dan penambang batu gamping, kalau pagi bertani dan apabila sore mencari batu gamping untuk dibakar, kalau penghasilan dari bertani saja tidak cukup”.

(wawancara pada tanggal 19 Oktober 2014 di dusun Sumber Celeng, desa Banjarejo).

Uraian tersebut semakin menguatkan peneliti bahwasannya penghasilan selain dari hasil bertani, para warga desa ini berproduksi pula dari batu gamping. Kawasan karst bukan tidak berarti tidak boleh dimanfaatkan. Namun pemanfaatannya haruslah dilakukan dengan benar dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh dampak yang akan muncul. Dengan melihat pertimbangan dan keuntungan ekonomi jangka pendek sangatlah tidak berarti jika akan menimbulkan kesengsaraan di masa yang akan datang. Kawasan karst merupakan kawasan yang unik dan sangat berbeda dengan ekosistem lainnya. Perubahan sekecil apapun akan berdampak perubahan pada ekosistemnya. Dampak yang langsung dan nyata tentu akan kembali pada manusia terutama yang bertempat tinggal di kawasan tersebut dan sekitarnya. Matinya sumber air bawah tanah akan dengan segera dirasakan bersamaan dengan hilangnya Zona Epikarst yang ada.

Pemanfaatan kawasan karst dan sumber perolehan pendapatan desa merupakan bagian dari Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71



Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan Partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Dan Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Aset desa pada pasal 76 ayat (1): Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Banyaknya permasalahan perekonomian suatu desa di Indonesia dalam suatu wilayah tak lepas dari peran pemerintah daerah. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah". Maka daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri, termasuk mengelola SDA yang ada. Hal ini dirasa tepat karena suatu daerah mengetahui kelebihan serta kekurangan dan potensi yang dimiliki untuk pembangunan perekonomian suatu wilayah/daerahnya masing-masing. Otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi yang berarti pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri menurut Amrah Muslimin dalam Ridwan (2009:16).





## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pembahasan dari skripsi ini akan dibatasi pada beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja potensi kawasan karst Desa Banjarejo yang dapat menghasilkan pendapatan asli desa (Gua, Mata air, Ponor dan Pesisir/laut)?
2. Apa langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi Desa Banjarejo secara lestari?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis jabarkan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui potensi kawasan karst Desa Banjarejo (pemanfaatan sumberdaya alam, yakni gua, sumber mata air dan daerah pesisir/laut) yang dapat menghasilkan pendapatan desa.
2. Mendeskripsikan langkah yang dilakukan pemerintah desa dan daerah dalam pengelolaan potensi kawasan karst Desa Banjarejo secara lestari.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara analisis teori dan aplikasi di lapangan sebagai kontribusi penelitian kepada pemerintah/lembaga, konservasi dan penggiat olahraga alam bebas, adapun aspek-aspek yang perlu diuraikan adalah:

1. Aspek teoritis (akademis)

- a) Menjadi bahan referensi tambahan dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan sumbangan pikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik, terutama yang berkenaan peran pemerintah daerah dalam pemanfaatan serta melestarikan sumberdaya alam kawasan karst.
- b) Bagi Ilmu Pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu lingkungan dan ekonomi masyarakat suatu daerah.

## 2. Aspek praktis

- a) Bagi masyarakat, dengan diketahui potensi gua, mata air bukit karst dapat memberikan gambaran manfaat sebagai sumber daya air dan peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di desa Banjarejo, kecamatan Donomulyo, kabupaten Malang.
- b) Bagi pemerintah daerah, sebagai wacana dan referensi pemanfaatan serta pengelolaan lingkungan, serta sebagai bahan rujukan kepada pemerintah kabupaten malang mengenai pemanfaatan pengelolaan kawasan karst ini.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi secara keseluruhan dan untuk terdapatnya susunan pengertian yang sistematis, maka peneliti mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi serta sistematika pembahasan.

## Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang teori-teori atau pendapat ahli yang berkaitan dan menunjang penulisan skripsi. Uraian teori-teori yang digunakan dalam disiplin ilmu Administrasi publik dalam konsentrasi administrasi pemerintahan daerah yang berkaitan.

## Bab III Metode Penelitian

Membahas tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, keabsahan data, instrumen penelitian dan analisis data.

## Bab IV Hasil dan pembahasan

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, analisis data dan interpretasi data.

## Bab V Penutup

Merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan diuraikan mengenai hal penting secara garis besar dan umum. Sedangkan dalam saran berisikan tentang masukan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh instansi atau lembaga yang terkait didalamnya.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Fungsi Administrasi Publik

Pentingnya studi Administrasi Publik, khususnya bagi negara berkembang melihat sejauh mana kinerja aparatur dan pemerintah negara dalam pembangunan. Diberbagai media banyak dijumpai bahwa banyak kekurangan dan program pemerintah dinilai buruk, ini karena mengesampingkan dimensi Administrasi Publik. Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3), menyatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasi dan mengimplementasikan dalam mengelola keputusan dalam kebijakan publik.

Henry dalam keban (2004:6) menulis:

Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Adminitrasi Publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik

(Zauhar, 1996:33) mendefinisikan Administrasi Publik sebagai proses kerja sama yang berlaku dalam organisasi publik untuk memberikan pelayanan kepada publik atau dengan rumusan yang agak spesifik, Administrasi Publik adalah proses kerja sama dalam suatu organisasi publik untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Sementara itu, Soempomo dalam Thoha (2008:44), menulis bahwa administrasi negara atau '*public administration*' biasanya yang dimaksud adalah bagian dari keseluruhan lembaga-lembaga dan

badan-badan pemerintahan negara sebagai bagaian dari pemerintah eksekutif baik pusat maupun didaerah yang tugas kegiatannya terutama melaksanakan kebijaksanaan pemerintah (*public policy*). Studi Administrasi Pubik memang sangat penting keberadaannya ditengah urusan pembuatan kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintahan.

Menurut Tjokroamidoyo, tiga fungsi utama administrasi publik adalah formulasi/perumusan kebijakan, pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi dan penggunaan dinamika administrasi (Tjiptoherijanto & Manurung, 2010:112) adalah sebagai berikut:

a. Formulasi Kebijakan

Fungsi formulasi kebijakan memiliki empat subfungsi, yaitu analisis kebijakan, perkiraan masa depan untuk menyusun langkah-langkah alternatif, penyusunan program/strategi dan pengambilan keputusan. Konsistensi formulasi kebijakan dibutuhkan dalam pencapaian tujuan masyarakat yang sejaterah. Konsistensi tersebut mencakup konsistensi antara waktu/generasi, antar unit pemerintah.

b. Pengaturan/Pengendalian unsur-unsur administrasi

Unsur-unsur administrasi yang perlu dikelola ialah organisasi, keuangan, kepegawaian dan sarana-sarana lain. Tugas administrasi adalah mendapatkan, menggunakan, mengendalikan, keempat elemen administrasi tersebut. Pengaturan/ pengendalian unsur-unsur adminis trasi, tidak lain adalah pengelolaan internal administrasi publik atau dapat juga dikatakan sebagai pengelola kapasitas admnistrasi publik. Membaiknya kapasitas administrasi publik diukur dari kemampuan menjalankan tugas-tugas rutin dan kemampuan merespon perkembangan eksternal yang mencakup perkembangan ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan perkembangan-perkembangan internasional.

c. Penggunaan dinamika administrasi

Dinamika administrasi meliputi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan dan komunikasi. Peraturan/pengendalian unsur-unsur administrasi lebih menekankan pada aspek organisasi dari administrasi publik, maka penggunaan dinamika administrasi menekankan pada aspek manajemen dari admnistrasi publik.



## B. Peran Pemerintah

Menurut Suhady dalam Ridwan (2009:197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam Bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, Kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc.* Yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian 17 pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja ( W. Riawan Tjandra, 2009 : 197).

Dalam segi bahasa pemerintah atau pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan dalam KBBI (2000) didalam kata tersebut terdapat beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari perintah “perintah” diantaranya:

1. Adanya “keharusan”, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.
2. Adanya dua pihak, yaitu memberi dan menerima perintah
3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah.
4. Adanya kekuasaan untuk untuk memberi perintah.



Pada umumnya pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai kewenangan tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Hal ini berlaku untuk melaksanakan kekuasaan. Hal ini berlaku untuk pemerintah yang berdaulat maupun yang tidak berdaulat. Pemerintah yang berdaulat mempunyai hak untuk melaksanakan kekuasaan yang bersifat memaksa. Didalam urusan rumah tangga termasuk melindungi masyarakat dan wilayah negara, meningkatkan taraf hidup dan lingkungan hidup, memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI (2000), peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah yang dimaksud adalah perangkat perangkat tingkah yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam melaksanakan proses pemerintahan dan pembangunan di negara berkembang, pemerintah mempunyai kedudukan dan fungsi yang strategis ini berkaitan dengan fungsinya yaitu selaku pelaku pelayan publik guna meningkatkan kesejahteraan, keadilan, keamanan dan ketentraman masyarakat.

Pemerintah itu hadir untuk mengelola kemudian mendistribusikan kebutuhan masyarakatnya melalui organisasi pemerintahan, dan organisasi pemerintah terendah yang berhadapan langsung dengan masyarakat adalah pemerintah desa atau kelurahan. Pemerintah desa atau kelurahan memegang peranan yang penting dalam pengelolaan kebutuhan masyarakat melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemerintah tidak lepas dari kebijakan publik, aktivitas administratif, organisasi dan manajemen, pelayanan publik serta kepentingan dan urusan publik. Fungsi ini berkaitan erat dengan fungsi pemerintahan yang

dilakukan oleh pemerintah yaitu menyediakan layanan sipil dan jasa publik tidak di privatisasikan bagi setiap orang yang membutuhkan.

Menurut Rasyid (2000:48) juga menyebutkan bahwa: Dalam menjalankan pemerintahan maka tugas pokok yang harus dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Dan ada beberapa poin fungsi pemerintah yang harus dilaksanakan adalah:

a. *Servicing Function* (fungsi pelayanan)

Menurut S. Pamudji dalam Martin Jimung (2005:42), kehadiran pemerintah dalam fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan juga tidak memberatkan, singkatnya pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan secara non-diskriminatif dengan kualitas yang sama/tidak pilih kasih. Melainkan semua orang memiliki hak yang sama, yakni hidup untuk melayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan dan lain sebagainya.

b. *Regulating Function* (fungsi pengaturan)

Menurut Risawanda Imawan dalam Martin Jimung (2005:42) memberikan penekanan bahwa pengaturan itu tidak hanya kepada rakyat tetapi juga kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan harus dinamis, yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan sekaligus meminimalisasi intervensi negara dalam kehidupan bermasyarakat.

### C. Pemerintah Daerah dan Wewenangnya

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dalam semua sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah.

Landasan dasar pembentukan pemerintahan daerah di Indonesia adalah UUD 1945, yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 18. Pasal 1 ayat 1 berbunyi: Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Sedangkan Pasal 18 menyatakan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang yang memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan sistem pemerintahan negara dan hak-hak usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Menurut Siswanto Sunarno (2008:54) menjelaskan Undang-Undang tersebut antara lain :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun



1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Menurut Suhady dalam Ridwan (2009: 197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect. D*

Pemerintahan dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian 17 pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra, 2009 : 197). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.



Sebagaimana telah disebut di atas Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen itu mengatur mengenai pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada pasal 18 ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Pasal 18 ayat (6) menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah



masih berpatokan pada Undang-Undang pemerintahan pusat. Menurut Siswanto Sunarno (2009:8) berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran-pemikiran tersebut antara lain :

Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsta, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan pembangunan nasional.

Sesuai dengan UUD 1945 sebelum diamandemen pemerintahan daerah terdiri atas daerah besar dan daerah kecil. Daerah besar adalah pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah daerah kecil adalah pemerintah kabupaten /kota



atau desa. Dalam hal provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom maka pemerintah kabupaten /kota dan desa bukanlah bawahan provinsi. Akan tetapi dalam hal Provinsi sebagai wilayah administrasi maka Pemerintah Daerah/Kabupaten adalah bawahannya, Pemkab/Kota adalah subordinat wilayah administrasi. Dalam hal provinsi sebagai daerah otonom, maka pemerintah daerah/kota adalah daerah otonom. Hubungan pemerintah daerah dan provinsi sesama daerah otonom adalah koordinasi, jadi bukan hubungan hirarki antara atasan dan bawahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan urusan pemerintah kabupaten/kota bersifat wajib berskala kabupaten/kota adalah:

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- 2) Perencanaan pengawasan dan pemantauan tata ruang.
- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- 5) Penanganan bidang kesehatan.
- 6) Penyelenggaraan bidang pendidikan dan solusi sumberdaya manusia potensial.
- 7) Penanggulangan masalah sosial.
- 8) Pelayanan ketenaga kerjaan.
- 9) Pengendalian lingkungan hidup.
- 10) Pelayanan pertahanan.
- 11) Pelayanan kependudukan catatan sipil.
- 12) Pelayanan umum administrasi umum pemerintahan.
- 13) Pelayanan administrasi penanaman modal.
- 14) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
- 15) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangan.

Adapun urusan pemerintah yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi daerah yang bersangkutan



Sebagaimana halnya provinsi, kabupaten/kota juga menerima tugas pembantuan dari pemerintah atasnya yaitu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi (sebagai daerah otonom). Tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal agama dan kewenangan lain yakni kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro dan perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, dan lembaga perekonomian negara.

#### **D. Pemerintah Desa Wewenangny**

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batasan-batasannya; memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sma-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda : Suatu kesatuan wilayah yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu, memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kepada hukum adat dan peraturan perundang-undangan hindia-belanda untuk hal-hal tertentu, dan pemerintahannya merupakan bagian terbawah dari susunan pemerintah kabupaten atau swapraja.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pada masa pemerintahan Pendudukan balatentara jepang: Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan peraturan peraturan hindia-belanda serta pemerintah militr



jepang, yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu, memiliki hak menyelenggarakan urusan rumahtangganya sendiri, merupakan suatu ketatanegaraan terkecil dalam daerah syu (pemerintah daerah tertinggi) yang kepalanya dipilih oleh rakyatnya, dan merupakan sistem dari pertahanan militer.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan sejak kemerdekaan hingga lahirnya orde baru pada Pasal 1 Undang-Undang Desapraja (Nomor 19 Tahun 1965), Desapraja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumahtangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri

Berdasarkan peraturan perundang-undangan lahirnya orde baru hingga sekarang: Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumahtangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya secara resmi suatu pengertian tentang desa sebagaimana tersebut diatas, maka pengertian atau batas-batasan tentang desa tidak perlu lagi dirumuskan oleh berbagai pihak maupun dalam peraturan yang derajatnya dibawah Undang-Undang. Telah dimaklumi bahwa desa dalam perjalannya telah mengalami perubahan baik yang menyangkut aspek yuridis formal maupun yang berkaitan dengan luas wilayah, sistem pola ketahanan masyarakat, sarana dan prasarana, sumber penghasilan, sistem administrasi pemerintahan, lembaga

kemasyarakatan, susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dan lain-lainnya.

#### **E. Pendapatan Asli Desa**

Yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang No.5 Tahun 1979, disebutkan bahwa pendapatan asli desa dari:

- a. Hasil tanah-tanah kas desa.
- b. Hasil swadaya dan sumbangan (partisipasi masyarakat).
- c. Hasil gotong royong.
- d. Hasil dari usaha lain-lain yang dilakukan oleh desa secara sah.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1982 tentang sumber pendapatan kekayaan desa pengurusan dan pengawasannya, pada Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PAD) terdiri dari:

- a. Kekayaan desa.
- b. Hasil swadaya dan sumbangan (partisipasi masyarakat).
- c. Hasil gotong royong.
- d. Pungutan desa.
- e. Hasil dari usaha lain-lain yang dilakukan oleh desa secara sah.

Kemudian dalam pasal 3 diuraikan secara jelas tentang jenis kekayaan desa, yaitu:

- a. Tanah kas desa.
- b. Pasar desa.

- c. Pemandian umum yang diurus oleh desa.
- d. Obyek-obyek rekreasi yang diurus oleh desa.
- e. Bangunan milik desa.
- f. Kekayaan lainnya milik pemerintahan desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (2) UU

Nomor 6 Tahun 2014 adalah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Aset desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 76 Ayat 1 dan 2 adalah (Ayat 1) Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:



a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **F. Karst**

### **1. Pengertian Karst**

Karst ialah suatu kawasan yang terdiri dari batu gamping dengan ditandai adanya cekungan, tonjolan bukit berbatu tak beraturan, lereng yang terjal, mempunyai sistem aliran bawah tanah, dan mempunyai gua. Ornamen di dalam gua terdapat beraneka ragam meliputi: *stalaktit, stalakmit, flowstone dan gourden*. Karst berasal dari bahasa yugoslavia, *krast* kemudian diadaptasikan dalam Jerman, yang berarti tempat tanpa air dan dingin, juga berkonotasi permukaan batuan gundul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI (2005:226).

Karst adalah daerah yang terdiri atas batuan kapuryang berpori sehingga air dipermukaan tanah selalu merembes dan menghilang kedalam tanah (permukaan selalu gundul karena kurangnya vegetasi). Karst adalah suatu bentang alam yang umumnya dibentuk oleh batu gamping, yang dicirikan oleh hadirnya cekungan-cekungan tertutup; kubah-kubah; gua-gua dengan berbagai ukuran; aliran permukaan yang terganggu; serta sistem pengasatan bawah permukaan (Kusumayudha, 2005: 157).

Dalam gunung sewu indonesia "*cave and journal*" (2005:62) klasifikasi bentang alam kawasan karst dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Berdasarkan cakupan luasan daerah agihan, sehingga dapat tidaknya kawasan karst teridentifikasi dari dasar (peta topografi, foto udara, citra indera), maka

dikenal kawasan karst minor atau mikro, dan mayor atau makro. Kawasan karst mikro adalah suatu kawasan yang terdiri dari batu gamping dengan kondisi yang terjal, adanya cekungan, tonjolan bukit berbatu tak beraturan, memiliki sistem aliran bawah tanah dan bergua (Anonim, 2008).

Kawasan karst terjadi akibat proses pelarutan batuan oleh air hujan, yang pada umumnya terdiri dari karbonat (batu gamping, dolomit), tetapi dapat pula pada gipsium dan halit (NaCl, KCl). Penampakan karst yang sudah berkembang baik juga dapat dijumpai pada batu pasir dan pasir kwarsa, tetapi pada umumnya terlihat perbedaan yang nyata dengan geomorfologi kawasan karst batu gamping (Ko, 2000).

Karst sering dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu eksokarst dan endokarst. Eksokarst adalah bentang alam lahan karst yang terlihat di permukaan bumi, sedangkan endokarst adalah bagian dalam atau di bawah permukaan bumi dari 5 kawasan karst. Meliputi lorong atau ruang yang berada didalam perut bumi atau sering disebut luweng atau gua. Gua mempunyai dua jenis dibedakan dari bentuk lorongnya, yaitu horizontal dan vertikal. Sedangkan berdasarkan letak dari mulut guanya, dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *tophill* ialah mulut gua yang berada pada puncak dari suatu bukit. *Swallowhole* ialah letak mulut gua yang berada pada ketinggian dari suatu bukit, namun belum mencapai puncaknya. Dan *doline* ialah mulut gua yang berada pada posisi di bawah dari kedua buah bukit atau berada pada aliran air sungai (Ko, 1985)

Sesuai dengan amanat Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012 bahwa bentang alam karst merupakan bentang alam yang menunjukkan bentuk eksokarst



dan endokarst merupakan kawasan karst, maka kawasan batu gamping di Kabupaten Malang merupakan kawasan karst yang perlu dilestarikan.

Menurut Faida (2011), karst merupakan istilah dalam bahasa Jerman yang diturunkan dari bahasa Slovenia (*kras*) yang berarti lahan gersang berbatu. Istilah ini di negara asalnya sebenarnya tidak berkaitan dengan batu gamping dan proses pelarutan, namun saat ini istilah *kras* telah diadopsi untuk istilah bentuk lahan hasil proses pelarutan. Sedangkan Menurut Ford dan Williams (1989) mendefinisikan karst sebagai medan dengan kondisi hidrologi yang khas sebagai akibat dari batuan yang mudah larut dan mempunyai porositas sekunder yang berkembang baik. Karst dicirikan oleh: (i) terdapatnya cekungan tertutup dan atau lembah kering dalam berbagai ukuran dan bentuk, (ii) langkanya atau tidak terdapatnya drainase/sungai permukaan, dan (iii) terdapatnya gua dari sistem drainase bawah tanah. Kawasan karst merupakan wilayah yang dapat menangkap dan menyimpan air hujan, sebagai habitat bagi beberapa spesies makhluk hidup khusus, dan berpotensi pertambangan karena fisiografi berbukit-bukit yang terbentuk dari batu gamping. Batuan gamping yang belum terkarstifikasi akan mempunyai nilai porositas yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan batuan gamping yang telah terkarstifikasi dengan baik. Batuan gamping dan juga dolomit yang belum terkarstifikasi mempunyai kisaran nilai porositas yang sangat kecil (maksimal 10%). Sebaliknya, jika batuan gamping telah terkarstifikasi akan mempunyai nilai porositas yang tinggi / mencapai 50% (Haryono, 2010).





## 2. Potensi Karst

Potensi adalah Kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 388). Berdasarkan letak perkembangan karstifikasi terhadap datum permukaan topografi, dikenal kawasan eksokarst dan endokarst. Kawasan eksokarst terbentuk di atas permukaan topografi, dicontohkan antara lain bentukan kerucut karst, sedangkan endokarst hanya dapat diidentifikasi apabila pengamat masuk ke bawah permukaan, misalnya gua karst. Selain klasifikasi tersebut berdasarkan tingkat perkembangan secara relatif, dijumpai kawasan mesokarst dan holokarst.

Kawasan mesokarst ditandai dengan masih dijumpainya aliran sungai permukaan sehingga proses endapan alami masih tampak signifikan, pembentukan kerucut karst belum berkembang, dan agihannya merupakan zone peralihan antara kawasan non karst dan holokarst. Kawasan holokarst adalah kebalikan dari merokarst, dicirikan oleh hampir tidak adanya aliran sungai permukaan dan yang kemudian berubah menjadi aliran sungai bawah permukaan (*sub-drainage*) sehingga proses eksogenik yang berlangsung efektif tinggal pelarutan, permukaan topografi nyaris dihiasi oleh kerucut-kerucut karst (*karst conicals*) berbagai jenis dan diantaranya terbentuk ledokan-ledokan karst (*karst depressions*) dengan berbagai jenis maupun ukurannya.

Bentang alam karst memiliki lingkungan hayati yang spesifik. Penyebaran bentang alam karst di dunia cukup luas, antara lain di Amerika, Eropa dan Asia (Kusumayudha, 2005:1). Bentang alam karst akan memperlihatkan bentuk-bentuk

khusus, tergantung di daerah mana topografi karst tersebut terbentuk. Bentuk topografi karst di daerah tropis tentu saja berbeda dengan bentuk karst di daerah sub tropis, lingkungan arid dan sebagainya (Kusumayudha, 2005:1). Di Indonesia terdapat beberapa lahan karst yang cukup luas, antara lain berada di pulau Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Salah satu topografi karst yang terkenal di Indonesia adalah Gunung Sewu (Kusumayudha, 2005:2)

Tabel. 1 Klasifikasi karst menurut KEPMEN Nomor 1456K/20/MEM/2000

No.	Karst Kelas 1	Karst Kelas II	Karst kelas III
1.	Berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi hidrologis	Berfungsi sebagai pengimbun air bawah tanah, berupa daerah tngkapan air hujan yang mempengaruhi naik-turunnya muka air bawah tanah di kawasan karst, sehinggamasih mendukung fungsi umum hidrologi	Kawasan karst yang tidak memiliki kriteria kelas I dan kelas II
2.	Mempunyai gua-gua dan sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya membentuk jaringan	Mempunyai jaringan lorong-lorong bawah tanah hasil bentukan sungai dan gua yang	

	<p>baik mendatar maupun tegak yang mencukupi fungsi hidrologi dan ilmu pengetahuan</p>	<p>sudah kering, mempunyai speleotem yang sudah tidak aktif atau rusak, serta sebagai tempat tinggal fauna yang semuanya memberi nilai dan manfaat ekonomi</p>
3.	<p>Gua-guanya memiliki speleotem aktif dan peninggalan sejarah sehingga potensial untuk dikembangkan</p>	
4.	<p>Mempunyai kandungan flora fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi sosial, ekonomi, budaya serta pengembangan ilmu pengetahuan</p>	

Sumber: Prosiding Workshop Ekosistem Karst (2011: 212).





### 3. Konservasi/Pelestarian Karst

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Konservasi atau pelestarian mempunyai tiga arti:

- a. Proses atau cara perbuatan melestarikan.
- b. Perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan; pengawetan; konservasi; sumber-sumber alam.
- c. Pelestarian sumberdaya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana. dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.

Gua sebagai lingkungan yang khas dan unik memerlukan perlindungan dan pengelolaan yang semestinya mengingat potensinya cukup besar di Indonesia.

Beberapa pertimbangan perlunya perlindungan gua dan karst adalah:

1. Merupakan lingkungan yang sangat rentan sekali terhadap perubahan lingkungan,
2. Menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang unik
3. Fauna yang hidup di dalamnya sangat rentan terhadap kepunahan karena biasanya mempunyai populasi yang sangat kecil dan tingkat toleransi terhadap perubahan lingkungan sangat sempit,
4. Merupakan sebuah laboratorium alam untuk mempelajari biologi dan evolusi makhluk hidup serta sejarah iklim masa lampau,
5. Tempat tinggal beberapa fauna yang penting untuk keseimbangan ekologi (kelelawar) dan juga fauna bernilai ekonomi tinggi (walet),
6. Mempunyai peninggalan sejarah budaya yang penting

7. Sebagai sumber perokonomian yang penting terutama sebagai penampung sumber air bawah tanah,
8. Sebagai tempat untuk wisata yang bernilai ekonomi tinggi jika dikelola secara benar beberapa pertimbangan lainpun masih banyak yang belum diungkapkan namun pertimbangan di atas sudah cukup untuk menjadikan dasar perlindungan terhadap ekosistem gua karst.

Di Indonesia sendiri belum banyak gua yang dilindungi oleh Undang-Undang, namun ada beberapa yang dilindungi seperti perlindungan terhadap Luweg Jaran yang sangat terkenal dengan keindahan dekorasi guanya. Sementara laju kerusakan ekosistem gua sangat cepat dengan cepatnya laju penurunan kualitas lingkungan di sekitar kawasan karst maupun dalam karst karena aktivitas manusia yang tidak terkendali. Perlindungan terhadap kawasan karst biasanya berbenturan dengan kepentingan ekonomi sesaat yang kadang tidak mempertimbangkan kepentingan ekonomi jangka panjang.

Untuk mewujudkan kelestarian gua-gua karst diperlukan beberapa tindakan nyata yang dapat mencegah atau setidaknya mengurangi laju kerusakan ekosistem gua. Hal yang mendasar untuk perlindungan ekosistem gua dan karstnya adalah menumbuhkan kesadaran pentingnya karst dan gua bagi umat manusia di setiap lapisan masyarakat, mempertahankan tradisi maupun kepercayaan masyarakat lokal yang dapat mendukung pelestarian gua dan karst namun juga dapat dimanfaatkan secara bijaksana sebagai sumber pendapatan, melakukan survei potensi biotik dan abiotik sebagai landasan untuk pengelolaan gua terutama pemantauan terus-menerus untuk memahami dinamika yang terjadi



dalam gua dan sekaligus sebagai acuan peringatan dini terhadap perubahan lingkungan, pengelolaan wisata gua secara bijaksana berlandaskan kaidah-kaidah yang sesuai untuk mendukung kelangsungan ekosistem gua, pembuatan sistem zonasi kawasan karst sebagai dasar pemanfaatan kawasan karst.

Adapun beberapa Mengingat luasnya bentang alam kawasan karst yang tersebar diindonesia dan fungsi startegis yang dimiliki (antara lain fungsi hidrolik dan fungsi sebagai habitat yang spesifik untuk flora dan fauna) juga jutaan jiwa manusia yang kehidupannya tergantung pada keberadaan kawasan karst serta perannya sebagai kawasan tangkapan dan penyerapan/imbuhan air hujan.

#### **4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Karst**

Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya (Sastropoetro, 1995). *“Participation becomes, then, people's involvement in reflection and action, a process of empowerment and active involvement in decision making throughout a programme, and access and control over resources and institutions”* (Cristóvão, 1990).

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil (PTO PNPM PPK, 2007).

Hoofsteede (1971) menyatakan bahwa patisipasi adalah *“the taking part in one ore more phases of the process”* sedangkan Keith Davis (1967) menyatakan bahwa patisipasi *“as mental and emotional involment of persons of person in a*





*group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them”*

Verhagen (1979) dalam Mardikanto (2003) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Theodorson dalam Mardikanto (1994) mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin keilmuan. Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau responses atas rangsangan-rangsangan yang diberikan; yang dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari manfaat (*rewards*) yang dapat diharapkan (Berlo, 1961).

Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Conyers (1991) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting.

Pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep *man-cetered development* yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia.

Potensi kawasan karst menurut Aminullah (2001) cukup beragam, antara lain potensi mineral (pertambangan batu gamping), potensi penyimpan air, potensi organik (sebagai habitat kelelawar, walet dan ular), serta potensi wisata dan ilmu pengetahuan. Walaupun potensi kawasan karst cukup banyak, namun menurut Gunawan (2011) masyarakat masih menganggap bahwa kawasan karst hanya memiliki manfaat untuk pertambangan. Masyarakat belum dapat memanfaatkan potensi lain pada kawasan karst, sehingga kawasan karst hanya dieksploitasi untuk diambil batu gampingnya karena faktor ekonomi. Hal senada diungkapkan oleh Handayani (2010), bahwa dari hasil penelitiannya di Kawasan Karst Citatah, Kabupaten Bandung, terlihat bahwa masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar dibandingkan kerugian yang didapat akibat kegiatan



penambangan di kawasan karst, sehingga mereka masih terus melakukan penambangan di kawasan karst tersebut.

### **5. Pengelolaan Kawasan Karst di Era Otonomi Daerah**

Pengelolaan itu berakar dari kata “kelola” dan istilah lainnya yaitu “manajemen” yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Menurut Bahri dan Zain (1996) bahwa pengelolaan itu adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”. Terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut kedalam Bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesiakan menjadi “manajemen” atau “menejemen”.

Seiring pendapat diatas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1958: 412) disebutkan bahwa pengelolaan berarti penyelenggaraan. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan/ pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Menurut Drs. Winarno Hamiseno (1978:1), pengelolaan adalah substansi dari mengelola. Sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian.

Menurut Harsoyo (1977:121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah



suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan – perbedaan hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi- definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama. Dari beberapa ahli yakni menurut Wardoyo (1980:41) memberikan definisi sebagai berikut pengelolaan adalah suatu rangkai kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah”. Maka daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri, termasuk mengelola Sumber Daya Alam yang ada. Hal ini dirasa tepat karena suatu daerah mengetahui kelebihan serta kekurangan dan potensi yang dimiliki untuk pembangunan perekonomian suatu wilayah/daerahnya masing-masing.

Otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi yang berarti pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan dalam masyarakat dalam



daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri menurut Amrah Muslimin dalam Ridwan (2009: 16). Desentralisasi ini kemudian dibagi dua, yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Tujuan dari otonomi daerah adalah:

- a. Memberdayakan masyarakat
- b. Menumbuhkan prakarsta dan kreatifitas
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat
- d. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua urusan pemerintahan dibidang politik luar negeri, pertahanan, kemanan, peradilan moneter dan agam, serta urusan pemerintahan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP No.38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah). Disamping itu keleluasan otonomi mencakup pula kewenangan yang ututh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kedaerah berdasarkan PP No.38 Tahun 2007 tersebut.

Pengelolaan sumberdaya alam selama ini telah mendatangkan berbagai dampak dan permasalahan berawal dari berbagai produk perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam memberikan legitimasi kepada praktek pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memperhatikan keseimbangan sumber daya alam dan kepentingan masyarakat daerah. Berbagai Undang-Undang yang

mengatur tentang sumber daya alam mempunyai kelemahan substansial antara lain;

- a. Berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam untuk mengejar keuntungan ekonomi semata, sehingga lebih berpihak kepada pengusaha besar.
- b. Berpusat pada negara, sehingga menggunakan pendekatan kekuasaan secara sentralistis
- c. Bersifat lokal, sehingga banyak regulasi, kebijakan, kepentingan maupun pengelolaan yang tumpang tindih.
- d. Mengabaikan keadilan terhadap masyarakat daerah setempat.

Sumber daya alam memang tidak pernah lepas dari berbagai kepentingan, yaitu kepentingan negara, kepentingan modal dan kepentingan rakyat. Konflik antar kepentingan ini selalu memposisikan rakyat sebagai pihak yang kalah. Agenda desentralisasi yang dimaksudkan menyerahkan sejumlah kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah seharusnya memposisikan rakyat sebagai pelaku utama pengelolaan sumber daya alam. Namun, “segala penyakit yang tadinya ada dipemerintahan pusat nantinya akan berpindah ke pemerintahan daerah”.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan sangatlah penting untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan melalui tiga aspek yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu aspek yang paling mendasar dalam upaya kegiatannya adalah sosial (masyarakat), karena bagaimanapun masyarakat merupakan pihak yang paling tinggi tingkat aktifitasnya dengan kawasan tersebut





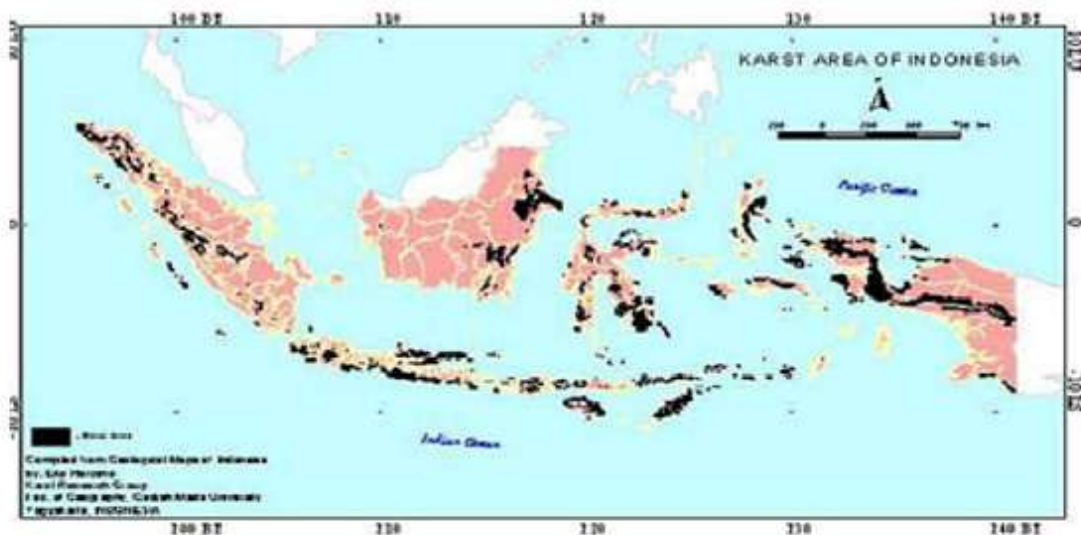
sebagai ujung tombak para perusahaan tambang batu kapur. Walaupun masyarakat bukan pemangku kepentingan kunci di sini, dalam arti mereka tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan secara legal, namun semua rencana kegiatan yang akan dilakukan di kawasan ini memiliki dampak yang akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Sehingga peran serta masyarakat sangat penting. Peran ini dapat ditingkatkan dengan mengetahui sikap masyarakat terhadap kawasan.

## 6. Kawasan Karst di Indonesia

Kawasan karst di Indonesia mencakup luas sekitar 15,4 juta hektare dan tersebar hampir di seluruh Indonesia. Perkiraan umur dimulai sejak 470 juta tahun lalu sampai yang terbaru sekitar 700.000 tahun. Keberadaan kawasan ini menunjukkan bahwa pulau-pulau Indonesia banyak yang pernah menjadi dasar laut, namun kemudian terangkat dan mengalami pengerasan. Wilayah karst biasanya berbukit-bukit dengan banyak gua.

Gambar 1. Peta sebaran Karst di Indonesia

### Peta karst Indonesia



## Sumber Prosiding Workshop Ekosistem Karst 2011:4

1. Gunung Leuser (Aceh)
2. Perbukitan Bohorok (Sumut)
3. Payakumbuh (Sumbar)
4. Bukit Barisan, mencakup Baturaja (Kabupaten Ogan Kombering Ulu)
5. Sukabumi selatan (Jabar)
6. Gombang, Kebumen (Jawa Tengah)
7. Pegunungan Kapur Utara, mencakup daerah Kudus, Pati, Grobogan, Blora dan Rembang Jawa Tengah)
8. Pegunungan Kendeng, Jawa Timur
9. Pegunungan Sewu, yang membentang dari Kabupaten Bantul di barat hingga Kabupaten Tulungagung di timur.
10. Sistem perbukitan Blambangan, Jawa Timur
11. Perbukitan di bagian barat Pulau Flores, tempat lokasi banyak gua, salah satu di antaranya adalah Liang Bua (Nusa Temggara Timur, NTT)
12. Perbukitan karst Sumba (NTT)
13. Pegunungan karst Timor Barat (NTT)
14. Pegunungan Schwaner (Kalbar)
15. Kawasan Pegunungan Sangkulirang - Tanjung Mangkaliat seluas 293.747,84 hektare, memiliki gua-gua dengan lukisan dinding manusia purba (Kalimantan Timur)

16. Perbukitan Maros Pangkajene, terletak di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, seluas 4.500 hektare dan beberapa di antara gua-gua yang ada memiliki lukisan purba

17. Kawasan karst Wowolesea, memiliki sistem air asin hangat (Sulawesi Tenggara)

18. Pulau Muna

19. Kepulauan Tukangbesi

20. Pulau Seram (Maluku)

21. Pulau Halmahera (Maluku Utara)

22. Kawasan karst Fakfak (Papua Barat)

23. Pulau-pulau Biak dan Pegunungan Tengah dan Pegunungan Lorentz (Papua)

24. Kawasan Batu Hapu, Tapin, Kalimantan Selatan

Sisa-sisa permukiman manusia purba ditemukan di Leang Cadang, Leang Lea, dan gua-gua lainnya di Maros, Gua Sampung dan Gua Lawa di Ponorogo, Gua Marjan dan Gua Song di Jember, Song Gentong (Tulungagung), Song Brubuh, Song Terus, dan Gua Tabuhan di Pacitan. Lukisan atau cap dinding ditemukan di kawasan Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Tenggara, Kepulauan Kai, Seram, Timor, serta Papua. Ini menunjukkan indikasi migrasi manusia ke arah timur. Selain itu ditemukan pula berbagai sisa berbagai jenis vertebrata berusia 1,7 juta tahun hingga 700.000 tahun.





## 7. Ekowisata Karst di Indonesia

Kawasan Batu Gamping (Karst) yang terbentang dari Pulau Sumatra sampai Papua memiliki peluang tersendiri bagi bangsa ini. Dalam hal peluang kawasan karst memiliki banyak manfaat diantaranya; sebagai penampung resapan air, penyeimbang ekosistem, tempat olahraga caving maupun kawasan wisata alam dengan memanfaatkan gua-gua disekitarnya. Namun karena kawasan Karst terbentuk dari batuan gamping yang biasa digunakan sebagai bahan baku semen menjadi ancaman tersendiri, dimana para investor asing akan berdatangan untuk menjadikan kawasan itu sebagai kawasan pertambangan.

Pengembangan yang selama ini dilakukan bila ditinjau dari aspek pengembangan ekowisata karst dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) Aspek Konservasi: pemanfaatan lahan tidak mengganggu dan mematikan fungsi lahan; tidak ada tekanan terhadap hutan; adanya program pelestarian daerah sekitar mata air; adanya program konservasi dan pelestarian seni dan budaya; penambangan yang dilakukan warga dalam skala kecil dan area parkir di lokasi gua mengancam keselamatan gua.
- 2) Aspek Pendidikan: adanya kegiatan pembinaan, diklat peningkatan SDM oleh Disbudpar; sosialisasi tentang kawasan karst; adanya alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM; pemasangan papan informasi; penyuluhan kepada warga masyarakat; pemanduan wisata; namun masih ada juga ulah wisatawan yang merusak keindahan alam.

- 3) Aspek Ekonomi: bertambahnya Pendapatan Asli Desa (PADes); memberikan lapangan pekerjaan bagi warga setempat; dan membuka peluang usaha/dagang bagi warga setempat.

## 8. Dasar Pengelolaan kawasan Karst

1. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456 .K/20/MEN/2000 tentang : Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst Pasal 11 Tentang Klasifikasi Karst

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031.

(Pasal 67) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:

- A. Kawasan cagar alam geologi;
- B. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan
- C. Kawasan imbuhan air tanah.

Pasal 68

(1) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a terdiri atas:

- A. Kawasan keunikan bentang alam;
- B. Kawasan keunikan batuan dan fosil; dan
- C. Kawasan keunikan proses geologi.

(2) Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan karst lindung meliputi:

- a. Kabupaten Bangkalan;

- b. Kabupaten Blitar;
- c. Kabupaten Lamongan;
- d. Kabupaten Malang;
- e. Kabupaten Pacitan;
- f. Kabupaten Pamekasan;
- g. Kabupaten Ponorogo;
- h. Kabupaten Sampang;
- i. Kabupaten Sumenep;
- j. Kabupaten Trenggalek;
- k. Kabupaten Tuban; dan
- l. Kabupaten Tulungagung.

(3) Arahan pengelolaan kawasan karst lindung meliputi:

- A. Penetapan lahan sebagai kawasan konservasi dan tidak diizinkan untuk alih fungsi lahan serta mutlak tidak boleh dieksploitasi;
- B. Percepatan reboisasi lahan yang rusak agar sifat peresapannya masih tetap berfungsi; dan
- C. Peningkatan pengawasan dan pengendalian untuk menjaga agar fungsi kawasan karst lindung tidak berubah.

3. Peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Pasal 60 ayat (2) menyatakan:

Kawasan keunikan batuan fosil sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Kriteria :



- a) Memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagaimana laboratorium alam
- b) Memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan dimasa lampau
- c) Memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi
- d) Memiliki tipe geologi unik
- e) Memiliki satau-satunya batuan dan atau jejak struktur geologi masa lalu

Ayat 2 menyatakan :

Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 huruf b ditetapkan dengan criteria

- a. Memiliki bentang alam gumuk pasir pantai
- b. Memiliki bentang alam berupa kawah kaldera,maar.leher vulkanik dan gumuk vulkanik
- c. Bentang alam gua
- d. Memiliki bentang alam ngarai/lembah
- e. Memiliki bentang alam kubah
- f.Memiliki bentang alam karst

Dari uraian keterkaitan pasal perpasal sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN di atas dapat ditegaskan bahwa bentang alam karst termasuk dalam kawasan cagar alam geologi yang otomatis dapat disebut kawasan lindung geologi.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 57 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

### **G. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable development*)**

Pembangunan berkelanjutan (Emil Salim, 1990) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Menurut KLH (1990) pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu :

- (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*;
- (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya;
- (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.

Senada dengan konsep diatas, Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable.
- b. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Dari sisi ekonomi Fauzi (2004) setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama menyangkut alasan moral.



Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama.

Kedua, menyangkut alasan ekologi, Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi.

Faktor ketiga, yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (*intergeneration welfare maximization*).

### **1. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan**

Memang diakui bahwa konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutanpun sangat multidimensi dan multi-interpretasi. Menurut Heal dalam Fauzi (2004). Konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi:

Pertama adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Kedua adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Pezzey (1992) melihat aspek keberlanjutan dari sisi yang berbeda. Dia melihat bahwa keberlanjutan memiliki pengertian statik dan dinamik. Keberlanjutan dari sisi static diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan, sementara keberlanjutan dari sisi dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah.

Karena adanya multidimensi dan multi-interpretasi ini, maka para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh komisi Brundtland yang menyatakan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.” Ada dua hal yang secara implisit menjadi perhatian dalam konsep brunland tersebut. Pertama, menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi. Kedua, menyangkut perhatian pada kesejahteraan (*well-being*) generasi mendatang. Hall (1998) menyatakan bahwa asumsi keberlanjutan paling tidak terletak pada tiga aksioma dasar;

1. Perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang;

2. Menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap *economic wellbeing*;

3. Mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan.

Konsep ini dirasakan masih sangat normatif sehingga aspek operasional dari konsep keberlanjutan ini pun banyak mengalami kendala. Perman et al (1997) mencoba mengelaborasi lebih lanjut konsep keberlanjutan ini dengan mengajukan lima alternatif pengertian:

1. Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (sustainable) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (non-declining consumption),
2. keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi dimasa mendatang,
3. keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam (natural capital stock) tidak berkurang sepanjang waktu (nondeclining),
4. keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, dan keberlanjutan adalah adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (*resilience*) ekosistem terpenuhi. Senada dengan pemahaman diatas, Daly (1990) menambahkan beberapa aspek mengenai definisi operasional pembangunan berkelanjutan, antara lain:

(Untuk sumber daya alam yang terbarukan : laju pemanenan harus sama dengan laju regenerasi (produksi lestari)





(Untuk masalah lingkungan : laju pembuangan limbah harus setara dengan kapasitas asimilasi lingkungan.

(Sumber energi yang tidak terbarukan harus dieksploitasi secara *quasisustainable*, yakni mengurangi laju deplesi dengan cara menciptakan energi substitusi.

Selain definisi operasional diatas, Haris (2000) melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman;

1. Keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri.
2. Keberlanjutan lingkungan: Sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.
3. Keberlanjutan sosial, keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.



## 2. Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Dari berbagai konsep yang ada maka dapat dirumuskan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini ada empat komponen yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang.

### 1. Pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial

Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti; meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Namun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan di banyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhannya.

### 2. Pembangunan yang menghargai keanekaragaman

Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan



yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti.

### 3. Pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan.

### 4. Pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang

Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan, implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur discounting. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani: *methodos* yang berarti cara atau jalan. Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan ( P. Joko Subagyo, 2006:1). “Metode adalah cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian” ( Hadari Nawawi dan Martini Hadari, 1995:66).

Berdasarkan permasalahan yang penulis rumuskan maka untuk memperoleh data yang diperlukan sehingga data relevansinya dengan tujuan yang akan dicapai. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 1993:63).

Jenis penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi (2001:63) bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan

keadaan subyek atau obyek peneliti (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.

Peneliti sengaja memilih tipe penelitian deskriptif kualitatif karena dirasa sangat cocok untuk menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian. Dengan tipe penelitian ini, peneliti dapat mengeksplorasi motivasi serta apa yang dilakukan obyek di lokasi penelitian. Menurut Nawawi dan Hadari (1993:38), “penelitian kualitatif objeknya adalah manusia, objek itu diteliti sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya dan secara naturalistik (natural setting)”. Dalam proses penelitian kualitatif, data yang didapatkan berisi perilaku dan keadaan individu secara keseluruhan. Penelitian kualitatif menunjukkan pada prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, ungkapan atau catatan orang itu sendiri.

Penelitian ini berbentuk kualitatif karena data-data yang dikumpulkan di lapangan adalah data-data yang berbentuk kata dan perilaku, kalimat, skema, dan gambar dengan latar alami, manusia sebagai instrumen. Kemudian data-data tersebut digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena sosial yang diteliti. Berdasarkan pada tujuan yang telah diuraikan, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran lengkap mengenai proses pemerintah daerah, pemerintah desa dalam pengelolaan potensi kawasan kars (secara lestari) pada Desa Banjarejo.



## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian kualitatif menghendaki batasan dalam penelitiannya. Fokus penelitian sangat penting dalam hal ini berfungsi sebagai batasan penelitian yang akan dilakukan sehingga akan memperjelas pembahasan. Mengenai fokus penelitian (Moleong, 2000) menyatakan bahwa dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu dijamah atau yang dapat dibuang. Pada penelitian ini ada dua macam maksud yang ingin dicapai dalam menetapkan fokus, yaitu antara lain:

1. Penetapan fokus dapat membatasi studi.
2. Fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan dan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Pendataan Potensi Kawasan Karst (Gua, Mata air, Ponor dan Pesisir/laut) yang berpotensi untuk pendapatan asli desa.
2. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah desa dan daerah dalam pengelolaan potensi kawasan karst secara lestari, meliputi:
  - a. Pengelolaan Gua dan Sumber Mata Air
  - b. Pengelolaan daerah Pesisir/Laut

## C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan penelitian



adalah Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Dengan pertimbangan bahwa desa Banjarejo merupakan kawasan yang sangat potensial akan sumber daya alamnya, kaya akan potensi air, gua dan potensi pesisir/laut. Adapun situs penelitian ini adalah desa Banjarejo dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang.

#### **D. Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah sumber data utama dalam penelitian yang berasal dari subjek. Sumber data primer dalam penelitian ini yang diperoleh adalah data pengalaman, pemahaman, dan pengetahuan informan.

##### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis primer. Dari pencatatan fakta yang didapat selama penelitian, peneliti menemukan data yang menjadi salah satu jalannya mahasiswa memulai.

##### **3. Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari informan. Upaya untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dengan fokus penelitian, maka informan ditentukan secara purposive sampling pada tahap awal.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah atau mencapai tujuan penelitian. Sedangkan yang digunakan sebagai alat/instrumen dalam penelitian

inisesuai dengan fokus penelitian yaitu peneliti sendiri yang telah dibantu dengan alat-alat pedoman wawancara serta sarana dokumentasi, tempat dan peristiwa. Instrumen tersebut disusun berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya.

## **F. Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

### **1. Wawancara**

Wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi. Sebagai alat pengumpul data, wawancara dapat dipergunakan dalam tiga fungsi sebagai berikut:

- a. Wawancara sebagai alat primer atau alat utama.
- b. Wawancara dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data utama, apabila data yang akan diungkapkan tidak mungkin diperoleh dengan alat lain yang lebih baik.
- c. Wawancara sebagai alat pelengkap
- d. Wawancara akan menjadi alat pelengkap apabila dipergunakan untuk mengumpulkan data yang tidak dapat diperoleh dari alat pengumpul data utama.
- e. Wawancara sebagai alat pengukur atau pembanding
- f. Data yang diperoleh melalui wawancara dipergunakan sebagai pengukur atau pembanding bagi data yang telah dihimpun melalui alat



pengumpul data lain sebagai alat utama untuk memecahkan suatu masalah (Hadari Nawawi, 1993: 111).

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil” (Sugiyono, 2008:137).

## 2. Dokumentasi

“Teknik dokumentasi adalah suatu yang memberi bukti atau bahan-bahan untuk membandingkan suatu keterangan atau informasi, penjelasan atau dokumentasi dalam naskah asli atau informasi tertulis” (Kamarudin, 1972:50).

“Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil-dalil, atau buku-buku yang lain yang berkenaan dengan masalah-masalah penyelidikan” (Hadari Nawawi, 1991:133).

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan catatan-catatan (dokumen) dan foto-foto kegiatan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

## 3. Observasi

“Observasi secara singkat dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian” (Hadari Nawawi dan Martini Hadari, 1995:74). “Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan



secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian” (Hadari Nawawi, 1993:100).

Dalam suatu penelitian, data sangat dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik pengumpulan data yang tepat dalam penelitian sangat memungkinkan pencapaian pemecahan masalah secara valid dan reliabel. Teknik-teknik dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **G. Keabsahan Data**

Setiap penelitian memerlukan standar untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitiannya, dalam penelitian kualitatif standar tersebut disebut keabsahan data. Menurut Moleong (1990), dalam menetapkan keabsahan dapat dilihat sebagai berikut:

#### **1. Derajat kepercayaan (*credibility*)**

Beberapa cara yang ditempuh agar kebenaran hasil penelitian dipercaya yaitu:

- a) Pengamatan terus menerus
- b) Triangulasi
- c) Peneliti akan membicarakannya dengan orang lain yang mempunyai pengetahuan tentang pokok penelitian dan juga tentang metode penelitian naturalistik atau kualitatif.

#### **2. Keteralihan (*transferability*)**

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada persamaan antar konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut peneliti

akan mencari dat dan mengumpulkannya dalam konteks yang berhubungan dengan proses perumusan kebijakan dan program yang selama ini dilakukan didaerah.

### 3. Kebergantungan (*dependency*) dan kepastian (*confirmability*)

Kebergantungan menurut istilah konvensional disebut dengan reabilitas, reabilitas merupakan syarat bagi validitas, hanya saja dengan alat yang reliabel maka akan dapat diperoleh data yang valid.

## H. Analisis Data

“Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapangan menjadi seperangkat hasil baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk kebenaran hepotesa” (Mohammad Hasyim, 1982:41).

“Teknik analisis data adalah unsur yang paling penting dalam penelitian, karena melakukan analisis maka data tersebut menjadi bermakna dan berguna dalam memecahkan masalah dan dapat digunakan dalam menjawab hipotesis dan semua permasalahan penelitian” (Erna Widodo dan Mukhtar, 2000:96).

Analisis data dalam suatu penelitian terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan sebagai berikut :

#### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

#### 2. Penyajian data

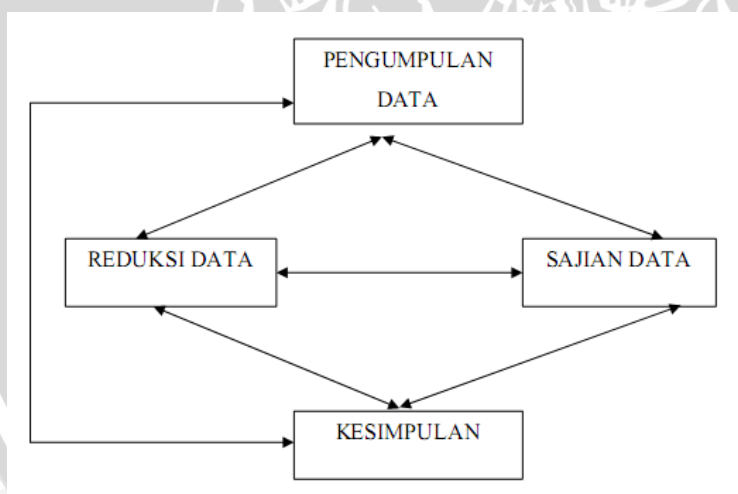
Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### 3. Penarikan kesimpulan

Peneliti mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, yakni yang merupakan validitasnya. (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992:16).

Skema analisis data menurut (Miles dan Huberman ) dalam Hadari Nawawi:

Gambar 2. Alur skema Analisi Data



Sumber: Metodologi Penelitian Sosial (Hadari dan Nawawi 1995:66)

Teori perubahan yang digunakan adalah perubahan yang direncanakan. Sebelum data dianalisis terlebih dahulu data diseleksi dan diolah dengan cara menginterpretasikan atau menafsirkan hasil observasi. Pada penelitian ini data yang diolah kemudian dianalisis, dilanjutkan dengan menarik suatu kesimpulan



induktif, yaitu cara berfikir didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil suatu kesimpulan secara umum dan dituangkan dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Dan Situs Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Banjarejo

Menurut cerita dari sesepuh dan beberapa tokoh masyarakat Desa Banjarejo pada jaman belanda bernama kedung dowo dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut. Dukuh kedung dowo dulunya masuk wilayah Desa Sumbermanjing Kulon sejak jaman belanda pada saat itu kedung dowo sebagai pedukuhan. Sedangkan desanya ikut Sumbermanjing Kulon, masyarakat mempercayai bahwa didesa Sumbermanjing masih teradapat sesepuh. Sampai saat ini makamnya dikeramatkan yaitu makam mbah kyai darso dan Mbok Nyai Dermi, konon cerita bila memasak nasi yang dimasak padi satu batang (Uli) sudah bias jadi nasi hingga dapat dimakan sekeluarga.

Di Dukuh Kedung Dowo ada seseorang sesepuh yang membuka lahan tempat tinggal (babat alas) yang tinggal di Dukuh Kedung Dowo yaitu Mbah Kasan Tani. Dinamakan dukuh kedung dowo karena sungai yang dibendung atau di dam membentuk irigasi sehingga sungai tersebut menjadi dalam dan memanjang sampai ratusan meter dan dinamai dengan kedung dowo, yang saat ini dinamakan Sungai Blimbing (Kedung Blimbing). Seiring waktu terus berjalan dukuh tersebut menjadi ramai dan penduduk pun terus bertambah dari dusun Nampurejo, Putukrejo dan Pasarpon. Mulai saat itu nama kedung dowo diganti dengan Desa Banjarejo pada tahun 1908, dan kepala desa yang bernama Bapak Sony.

Pada tahun 1937 kepala desa berganti dengan Bapak Kromo selama 5 tahun. Setelah itu pada tahun 1942 berlanjut oleh Bapak Klumpuk selamat 3 tahun. Pada tahun 1945 kepala desa dibantu dengan sekretaris desa (carik) bapak astro. Tahun 1951-1966 dengan dijabat oleh Bapak Budi Raharjo selama 15 tahun. Pada tahun 1966-1968 kepala desa yang diwakili oleh seorang sekretaris desa yaitu Bapak Mardjuki. Pada tahun 1968-1972 kepala desa oleh Wijayanto. Pada tahun 1972 dengan terpilih sebagai kepala desa Daer Budiono. Dan dilanjutkan oleh Bapak Subur Ari Bowo dan sekarang dijabat oleh Suwaji dan setelah itu dilanjutkan oleh Ibu Suliyah.

## **2. Visi Dan Misi Desa Banjarejo.**

Visi Desa Banjarejo yaitu “ Menuju Desa Banjarejo Berdaya Dan Sejahtera”.

Keberadaan visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju dimasa mendatang oleh segenap warga Desa Banjarejo. Dengan visi ini diharapkan akan terujud masyarakat desa yang maju dalam bidang pertanian sehingga dapat menghantarkan kehidupan rukun dan makmur. Disamping itu diharapkan juga akan inovasi pembangunan desa didalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, perternakan dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

Misi Desa Banjarejo yaitu

Hakekat misi Desa Banjarejo merupakan turunan dari visi Desa Banjarejo. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain misi Desa Banjarejo merupakan penjabaran dari lebih operatif dari visi. Penjabaran visi ini diharapkan



dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan dimasa yang akan datang dari usaha mencapai visi Desa Banjarejo.

Untuk meraih visi desa dengan pertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka misi desa banjarejo adalah:

1. Memberdayakan manusia secara luas khususnya dari lembaga pemerintah desa, BPD, LPMD, PKK dan Karang Taruna yang didasari kredibilitas dan integritas seorang pimpinan:
  - a. Kecerdasan intelektual
  - b. Kecerdasan emosional
  - c. Kecerdasan spiritual
2. Menghidupkan kembali lintas sektoral lembaga desa, BPD, LPMD, PKK dan Karang Taruna serta tokoh masyarakat sehingga terjalin komunikasi yang harmonis lahir dan batin dengan proporsi dan tupoksi masing-masing lembaga dan tidak bersifat semu atau formalitas belaka.
3. Menghidupkan dan menggerakkan potensi sumberdaya perempuan untuk lebih giat dan lebih maju lagi didalam mengambil peran pembangunan di desa melalui jejaring atau wadah yang ada yaitu PKK, Darmawanita, Koperasi wanita, Posyandu dan kelompok yang lain.
4. Memperbaiki dan meningkatkan manajemen pemerintah desa sesuai dengan etunjuk teknis operasional (PTO), dan standart operasional prosedur (SOP) dan pemerintah diatasnya sehingga dapat dicapai pemerintah desa yang bersih dan baik.

5. Memberikan informasi dan program-program desa secaterbuka dan transparan, kepada masyarakat sehingga masyarakat paham dan tidak ada dominasi oleh orang atau kelompok tertentu.
6. Mengolah ADD (Anggaran Dana Desa) secara benar sesuai PTO (Petunjuk Teknis Operasional) menyampaikan secara terbuka, jujur memberikan secara tepat aktu kepada orang yang menerima sesuai haknya masing-masing tidak ada system potongan, surat menyurat monopoli dst.
7. Mendahulukan cara musyawarah dan mufakat dalam membuat RAPBDES (Rencana Anggaran dan Pendapatan Desa) sehingga tahu alokasi mana yang penting dan didahulukan agar pembangunan desa dapat maju dan merata.

### **3.Keadaan Lokasi Penelitian**

#### **a) Keadaan Geografis**

Secara geografis Desa ini memiliki luas wilayah 21.668 Ha serta memiliki 4 dusun, yakni Krajan, Putukrejo, Sumberceleng, dan Nampurejo. Dengan topografi dan bentang lahan dengan luas pemukiman 298 Ha, ladang dan perbukitan tandus 557 Ha, luas lahan persawahan 215 Ha serta sisanya 11.107 Ha adalah hutan negara dan hutan rakyat. Desa ini masih sangat bergantung pada asupan pembelanjaan dan pengeluaran daerah mengingat perolehan pendapatan desa ini pada tahun 2014 adalah Rp. 1.165.750.000,- dan Pendapatan Asli Desa Rp. 317.000.000,- (Keputusan Kepala Desa Banjarejo Nomor : 143/05/429.621.021/2014 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desatahun Anggaran 2014).

Kecamatan Donomulyo terletak antara 112° 23' 30" – 112° 29' 64" BT dan 08° 16' 75" – 08° 19' 81" LS berbatasan sebelah Utara kecamatan Kalipare dan Pagak, sebelah timur dengan Kecamatan Bantur, sebelah Selatan Samudera Hindia, sebelah barat kabupaten Blitar. Dengan Luas Wilayah 192,60 Km<sup>2</sup> (6,47% luas kabupaten malang 3.347,8 Km<sup>2</sup>). Wilayah ini berada di ketinggian antara 0-400 Mdpl (meter diatas permukaan laut), dengan suhu udara rata-rata 20-33 derajat celcius. Kecamatan dimana yang memiliki 10 desa, merupakan kecamatan yang memiliki potensi alam yang berlimpah, dan salah satunya dari 10 desa yang berada di kecamatan ini adalah desa Banjarejo. Secara geografis desa Banjarejo terletak di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa Banjarejo merupakan bagian dari pegunungan selatan Jawa Timur bagian yang berada di wilayah kabupaten Malang yang berbatasan dengan

- a. Sebelah utara desa sumbermanjing kulon,
- b. Sebelah selatan berbatasan samudera indonesia,
- c. Sebelah barat desa kedung salam
- d. Sebelah timur berbatasan dengan desa tulungrejo.

#### **b) Demografi Desa Banjarejo**

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2014, jumlah penduduk desa banjarejo tercatat sejumlah 7.643 Jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa 48,98% adalah penduduk laki-laki dengan jumlah 3.740 jiwa dan 49,02% adalah penduduk perempuan dengan jumlah 3.903 jiwa. Struktur umur penduduk cenderung mengarah pada kelompok berusia muda sebesar 34,78%. Dengan demikian angka ketergantungan secara keseluruhan



mencapai 45,67%, atau bisa dikatakan setiap seratus penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 orang bukan orang usia produktif.

Tabel 2.. Pertumbuhan penduduk dari 5 tahun terakhir (2012-2014)

No.	Tahun	Jumlah Penduduk
1.	2012	6.986
2.	2013	7.447
3.	2014	7.643

Sumber: Data demografi Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.

#### 4. Situs Penelitian

##### a. Dinas ESDM Kabupaten Malang

Sebagaimana tertuang didalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang bahwa fungsi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang adalah sebagai satu kesatuan pelaksanaan pembangunan Bidang energi dan sumber daya mineral yang tertuang didalam tugas pokok Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melalui melalui struktur organisasi yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang.

Yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang sebagaimana fungsinya adalah jenis layanan administrasi yang meliputi :

- Rekomendasi Teknis Penyelidikan Umum Pertambangan;
- Rekomendasi Teknis Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Pertambangan;

- Rekomendasi Teknis Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Pertambangan;
- Rekomendasi Teknis Pertambangan Rakyat (SIPR) Bahan Galian Golongan C Non Perairan;
- Rekomendasi Teknis Pertambangan Rakyat (SIPR) Bahan Galian Golongan C di Perairan diluar Wilayah Sungai Lintas;
- Rekomendasi Teknis Pengolahan Pemurnian Bahan Galian Golongan A, B dan C;
- Rekomendasi Teknis Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Golongan A, B dan C;
- Rekomendasi Teknis Pemboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah;
- Rekomendasi Teknis Pengambilan Air Bawah Tanah (Mata Air);

### **Tugas**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai salah satu unsur pelaksana Teknis Pemerintah Kabupaten, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas :

1. Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Fungsi**

Sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor: 52 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral merupakan

unsur Pelaksana Otonomi Daerah di bidang energi dan sumber daya mineral mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

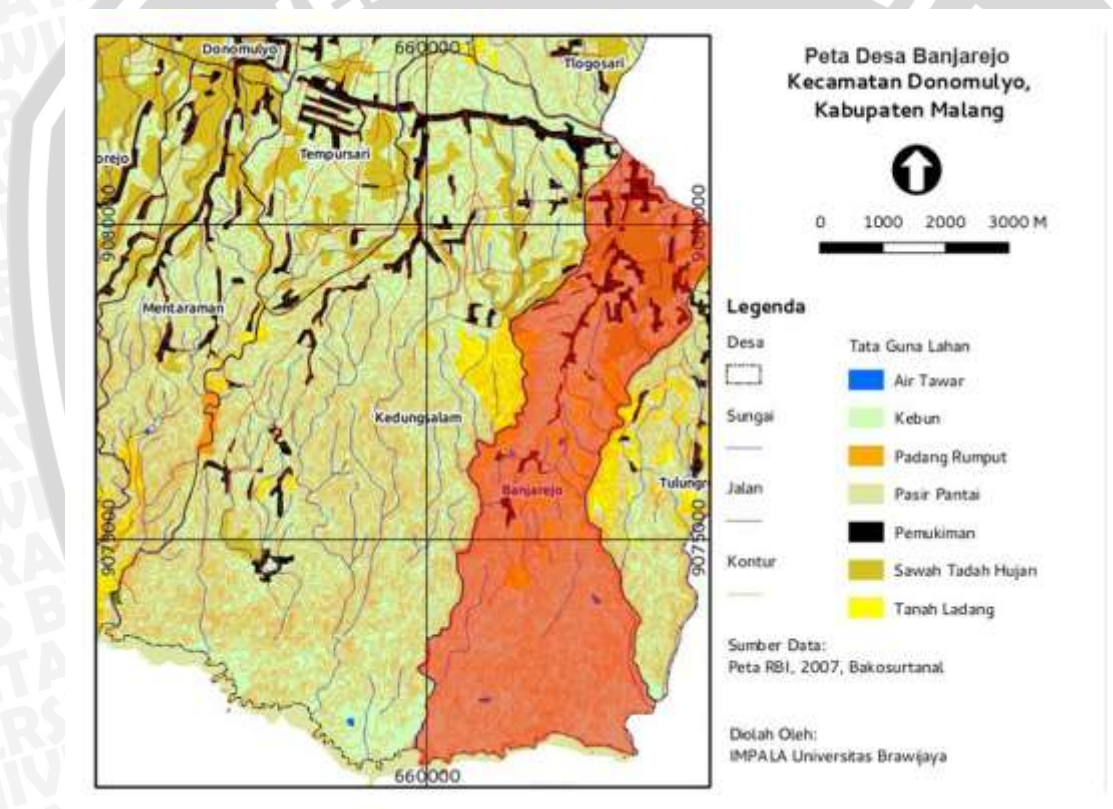
1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
2. Perencanaan strategis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang energi dan sumber daya mineral;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang energi dan sumber daya mineral;
6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral;
7. Pelaksanaan Standard Pelayanan Publik (SPP) dan Standard Operational Prosedure (SOP) yang wajib dilaksanakan bidang energi dan sumber daya mineral;
8. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Pembinaan UPTD;
10. Pemberian rekomendasi teknik dan pelaksanaan pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral;
11. Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.



### 5. Keadaan Wilayah Karst Banjarejo

Pada Peta Geologi lembar Blitar, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi (1992) stratigrafi di Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang merupakan batuan sedimen dari Formasi Wonosari (Tmwl), Formasi Campurdarat (Tmcl) dan Formasi Nampol (Tmn).

Gambar. 3. Peta Geologi Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang



Sumber: Peta Geologi Area Penelitian (2012, IMPALA UB)

Formasi Wonosari yang tersusun oleh batugamping koral, batugamping lempungan, batugamping tufan, batugamping pasir, napal, batu lempung hitam bergambut dan kalsirudit. Formasi Campurdarat tersusun oleh batugamping hablur dan batulempung. Formasi Nampol tersusun oleh batupasir gampingan dan

batupasir tufan, batu lempung dan napal. Umur satuan ini menurut Kadar (1986) disimpulkan Miosen Awal sampai Miosen Akhir.

Gambar. 4. Fosil Cangkang Siput Penyusun Batu Gamping



Sumber: Dokumentasi Studi Potensi Karst (2012, IMPALA UB)

Di lokasi penelitian tipe batumannya adalah batugamping koral yang merupakan Formasi Wonosari (Tmwl). Batugamping koral berwarna putih bila lapuk berwarna kuning kecoklatan, mengandung fosil koral dengan permukaan kasar dan tajam. Batugamping lempungan berwarna kelabu kehitaman tersusun dari fosil foram. Batugamping tufan berwarna kelabu terang tersusun oleh fosil moluska, algae. Batugamping pasiran berwarna kelabu hingga coklat mengandung kalsit, kuarsa dan mineral mafik. Napal berwarna kelabu putih kehijauan tersusun dari fosil moluska dan sisa tumbuhan sebagai sisipan batugamping. Batulempung berwarna hitam terdapat moluska air tawar, sisa tumbuhan dan bersisipan lapisan tipis gambut. Kalsirudit berwarna coklat merah sebagai sisipan batugamping.



Tebal satuan batuan ini berkisar antara 80 – 200 m (Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 1992)

Gambar. 5. Fosil terumbu karang/koral penyusun batugamping Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang



Sumber: Dokumentasi Studi Potensi Karst (2012, IMPALA UB)

Topografi daerah ini merupakan kawasan Karst yang mempunyai ketinggian 0 - 400 meter dari permukaan air laut. Karst yang disusun oleh batugamping ini mempunyai sifat mudah larut. Dengan sifat yang mudah larut tersebut membentuk kenampakan positif berupa bukitbukit kerucut (*conical hills*), bukit-bukit memanjang dan kenampakan negatif yaitu berupa cekungan (dolina). Disamping itu juga terdapat reruntuhan cekungan, gua, ponor, karren, lembah buta, uvala, sungai menghilang, mata air dan telaga. Geomorfologi permukaan di Desa Banjarejo pada umumnya berupa kumpulan dari bukitbukit berbentuk kerucut yang sambung menyambung. Sela antar bukit membentuk cekungan



(dolina). Fenomena ini disebut dengan KegelKarst. KegelKarst merupakan ciri khas Karst di daerah tropis.

Gambar. 6. Bukit kerucut dan bukit memanjang merupakan area karst, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang



Sumber: Dokumentasi Studi Potensi Karst (2012, IMPALA UB)

Cekungan (dolina) yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Dolina (*doline*) merupakan cekungan tertutup berbentuk bulat atau lonjong dengan ukuran beberapa meter hingga satu kilometer. Di Desa Banjarejo bentuk dolinanya tidak beraturan, ini merupakan ciri khas bentukan dolina di daerah Karst tropis.

Speleologi Stuktur Geologi yang berkembang di daerah kegiatan adalah adanya sesar mendatar dan sesar normal, sedangkan stuktur yang lainnya adalah adanya kekar (rekahan), struktur ini sangat lazim pada batuan terutama pada batugamping yang sifatnya mudah pecah-pecah. Dengan adanya kekar ini akan membentuk dalam proses pelarutan, yang nantinya akan membentuk terjadinya

gua (Laporan Inventarisasi Mulut Gua di wilayah Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, Yayasan Açıntyaçunyata Yogyakarta dan Perum Perhutani II Jawa Timur, 1997).

Proses pelarutan (Karst tifikasi) atau runtuh batugamping menyebabkan terbentuknya gua. Karst tifikasi terjadi karena adanya air permukaan yang masuk melalui rekahan dan pori-pori pada batugamping. Air yang masuk ke dalam rekahan dan pori batuan akan melarutkan batugamping yang ada, berangsur akan membentuk rongga yang pada akhirnya menjadi gua. Runtuhan (*collapse*) terjadi karena adanya bidang pelapisan batuan dan adanya retakan yang lemah dipengaruhi oleh momen gaya berat akibat beban batugamping sendiri. Kondisi ini dipercepat dengan tipisnya bidang atap gua. Runtuhan selain dipengaruhi oleh pelarutan air, juga dipengaruhi oleh pelapukan dari batugamping tersebut.

Sebaran ponor, gua, mata air dan telaga di desa banjarejo ini rata-rata berada di cekungan/dolina baik itu di lereng maupun di lembah. Hal ini terjadi karena mulut gua tersebut sebagai aliran air bawah permukaan, baik air keluar (*outflow*) maupun air masuk (*inflow*).

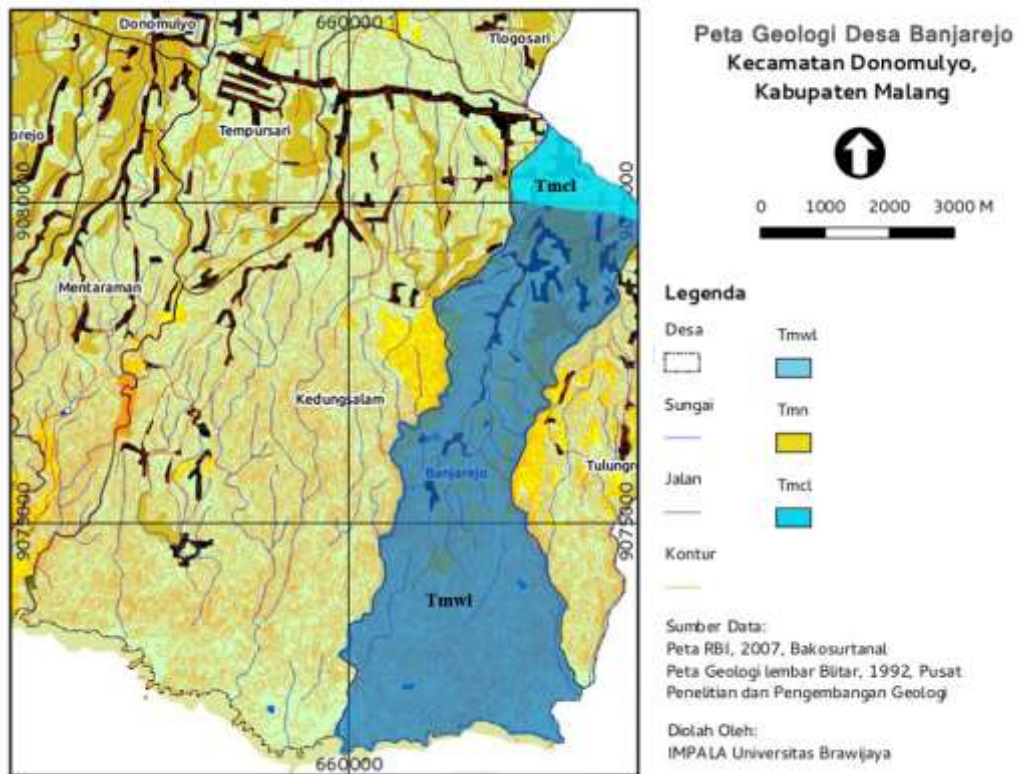




## B. Data Fokus Penelitian

### 1. Pendataan Potensi Kawasan Karst Desa Banjarejo

Gambar. 4. Peta geologi Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang



Sumber: Peta Geologi Area Penelitian (2012, IMPALA UB)

#### 1. Gua Pardi

Menurut cerita penduduk sekitar, Gua Pardi adalah nama seorang penduduk desa yang pernah terjatuh ke dalam gua ini, yang konon katanya karena ditarik oleh makhluk halus, semenjak saat itu penduduk setempat menyebut nama gua tersebut gua pardi. Gua ini terletak di samping ladang/sawah. Entrance merupakan susunan dari beberapa boulder horizontal sepanjang empat meter sampai akhirnya menjadi vertikal. Ornamen yang terdapat di goa ini berupa stalaktit dan flowstone.



## 2. Gua Lowo 1

Terletak dikawasan hutan jati desa Banjarejo, milik perum perhutani, 700 m dari dusun Sumberceleng yang merupakan dusun terakhir kearah selatan desa Banjarejo. Entrance berada didasar lembah yang cukup lebar. Sebelum masuk gua ini akan tercium aroma bangkai dan aroma guano yang sangat menyengat, Entrance gua lowo ini berbentuk vertikal dan cukup besar, terdapat banyak boulder kecil sehingga dapat memasuki dengan scrambling/berjalan. Ornamen gua ini banyak dan beragam, ketika masuk gua lowo terdapat *stalagmit*, *stalagtit*, *gourdam*, *micro gourdam* dan *flowstone* yang menghiasi ruang Gua Lowo.

## 3. Gua Lowo 2

Berada kurang lebih 200 meter dari gua lowo 1. Mulut goa lowo 2 ini merupakan mulut gua vertical dengan kedalaman 10 m., biasanya para penggiat olahraga alam bebas dan peneliti memillih mulut gua ini untuk masuk kedalam. banyak sekali sisa-sisa kelelawar yang mati di dalam gua, karena warga memberi penutup dari kayu/bambu agar kelelawar mati dan untuk pakan ikan lele. Padahal gua ini terkenal memang banyak kelelawarnya.

## 4. Gua Kepuh

Merupakan ujung dari aliran sungai musiman yang sedang kering dan disekeliling gua ditumbuhi pepohonan pisang yang merupakan ciri khas gua kepuh yaiu lembah. Disekitar entrance terdapat boulder. Lebar lorong gua ini cukup sempit sekitar 1,1 m dengan tinggi atap 2,8 m. Didalam gua ini terdapat ornamen bentukan gua dengan proses Karst tifikasi berupa sodastraw yang masih alami, juga terdapat *gourdam* dan *stalaktit*.

#### 5. gua untung 1

Masih berada dikawasan hutan banjarejo, namun letaknya sudah keluar dari hutan jati. Mulut gua ini berukuran 4,33 m x 4,84 m dengan ornamen stalagtit diatapnya. Didalam gua terdapat aliran sungai bawah tanah, namun air di gua ini masih belum dimanfaatkan warga sekitar .

#### 6. Gua untung 2

Merupakan tembusan dari gua untung 1. Berupa sumuran kecil yang berada didasar lubang tanah yang longsor. Diduga menjadi konsentarsi air apabila terjadi hujan. Mulut gua ini terletak sekitar 250 m dari mulut gua 1. Terdapat pula stalagtit-stalagtit kecil didalam gua ini.

#### 7. Gua Boncrot

Mulut gua ini terletak sebelah timur jalan makadam yang menghubungkan pantai bantol dengan dusun sumberceleng. Berdekatan dengan sebuah tempat yang namanya boncrot, yang menurut warga sekitar arti kata boncrot adalah tempat beristirahat. Mulut gua ini dapat dimasuki dengan scrambling.

#### 8. Gua Latif

Memiliki dua mulut gua yang berdekatan, berjarak kurang lebih 5 meter. Mulut gua pertama merupakan mulut gua horizontal. Dan mulut gua yang ke 2 adalah vertikal dengan kedalaman hingga 14 meter.

#### 9. Gua Sumur

Seperti namanya, gua ini menyerupai sebuah sumur dengan diameter 3 meter dan memiliki kedalaman 33 meter. Mulut gua ini terbagi menjadi dua karena ada batu besar didalam gua tersebut yang tersangkut di lorong gua vertikal

ini. Menurut warga dahulu gua sumur ini terdapat banyak burung sriti dan burung walet yang bersarang di dalam gua ini. Namun saat ini jarang dijumpai kelelawar yang ada di dalam gua ini.

#### 10. Gua Gumbreng

Gua ini berada di lembah pinggir jalan makadam menuju pantai bantol, lembahnya berisi pohon bambu yang lebat. Entrance dikelilingi oleh boulder besar dan labil. Untuk masuk kedalam gua ini scrambling sampai tiba dimulut gua ini.

40 meter berjalan kaki dan dasarnya merupakan sungai bawah tanah

#### 11. Gua Kadi

Mulut Goa dipinggir jalan makadam menuju pantai bantol. Mulut guanya kecil, berada didasar tebing dan dihalangi oleh beberapa pohon besar, karakteristik guanya tidak dialiri air, kemungkinan gua ini masih terhubung satu sistem dengan gua gumbreng

#### 12. Pantai Bantol

adalah sebuah pantai di pesisir selatan yang terletak di Dusun Sumberceleng, Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk menuju pantai ini tak terlalu susah, akses jalannya juga cukup mudah. Dari perempatan Desa Sumbermanjing Kulon, Kecamatan Pagak, berjarak kurang lebih 10 km ke arah selatan. Pantai Bantol belum dikenal secara umum karena jauhnya dari perkampungan.

Pengunjung biasanya adalah Kelompok Pecinta Alam dan peziarah yang datang pada saat-saat tertentu saja. Untuk dapat mendatangi pantai harus menempuh jalan tanah dan makadam melewati hutan jati. Di pantai ini terdapat



sedikit hutan bakau (mangrove) yang biasanya jarang ditemukan di daerah pantai selatan Jawa. Pantai kecil tetapi airnya jernih tidak ada kotoran atau sampah yang berada di pantai. Potensi wisata Karst ini dinilai sangat strategis melihat kondisi potensi yang memiliki keindahan laut yang bagus.

### 13. Kondang Blimbing

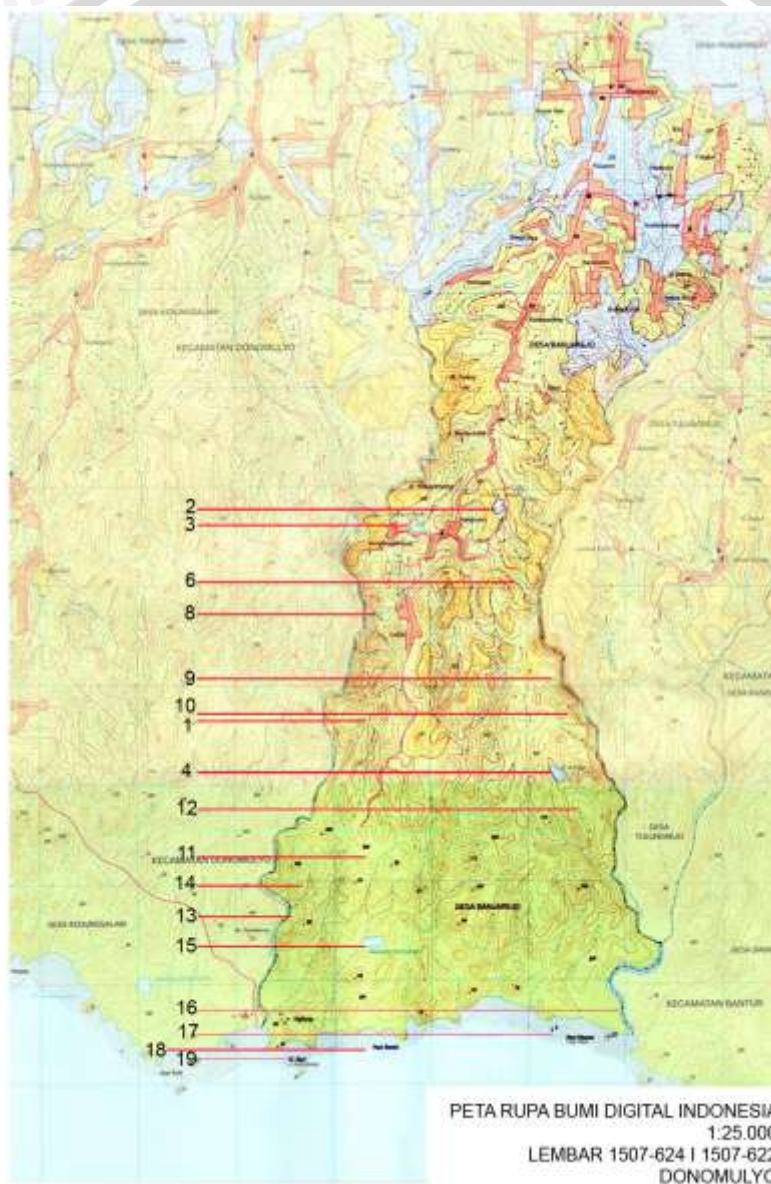
Di Pantai Bantol terdapat danau air payau khas mangrove yang merupakan muara beberapa sungai kecil yang mengalir dari hutan jati di sekitarnya. Air payau ini cukup tawar untuk digunakan sebagai air minum, tanpa terasa asin. Di sekitar hutan jati juga terdapat banyak gua batu kapur yang sering dikunjungi oleh Kelompok Pecinta Alam dan Penelusur Gua baik untuk kegiatan rekreasi maupun penelitian ilmiah.

Tabel 3. Daftar titik koordinat potensi kawasan Karst, Desa Banjarejo

No.	Nomor Peta	Nama Gua	Latitude	Longitude	Mulut gua
1	JT-590001-BJ	Gua lowo 1	08° 22' 27"	112° 37' 29,5"	Horizontal
2	JT-590002-BJ	Gua lowo 2	08° 21' 29"	112° 37' 28"	Vertical
3	JT-590003-BJ	Danau kapur wetan	08° 21' 10"	112° 28' 26"	-
4	JT-590004-BJ	Danau kapur kulon	08° 21' 05"	112° 27' 48"	-
5	JT-590005-BJ	Danau apusan	08° 22' 23"	112° 28' 39"	-
6	JT-590006-BJ	Gua Kepuh	08° 21' 24"	112° 27' 36"	Horizontal
7	JT-590007-BJ	Gua pardi	08° 21' 33"	112° 28' 38"	Vertikal
8	JT-590008-BJ	Gua untung 1	08° 21' 44"	112° 27' 58"	Scrambling
9	JT-590009-BJ	Gua untung 2	08° 21' 58"	112° 27' 44"	Scrambling
10.	JT-590010-BJ	Gua Boncrot	08° 21' 33"	112° 28 30"	Horizontal
11	JT-590010-BJ	Gua latif	08° 22' 47"	112° 27 33"	Horizontal
12	JT-590010-BJ	Gua Sumur	08° 22' 10"	112° 28 42"	Vertical
13	JT-590010-BJ	Gua gumbrek	08° 23' 28 "	112° 27 27 "	Horizontal
14	JT-590010-BJ	Gua kadi	08° 23' 02"	112° 27 19"	Horizontal
15	JT-590010-BJ	Gua boncrot	08° 21' 49"	112° 28' 30"	Horizontal

16	JT-590010-BJ	Sendang kamulyan	08° 22' 47"	112° 27' 33"	-
17	JT-590010-BJ	Kondang iwak	08° 22' 10"	112° 28' 42"	-
18	JT-590010-BJ	Pantai pasir muncar	08° 23' 28"	112° 27' 27"	-
19	JT-590010-BJ	Patai bantol	08° 23' 02"	112° 27' 19"	Digunakan para nelayan

Gambar 8. Peta Pendataan Potensi



Sumber: Hasil penelitian pendataan potensi oleh Zakaria Firmanda



## 2. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Pemerintah Desa Dan Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Kawasan Karst Secara Lestari

### a. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Pemerintah Desa

#### 1. Pengelolaan Gua dan Sumber Mata Air

Disini pengelolaan gua dan sumber mata air berfokus pada pemerintah Desa dan pemerintah (dinas ESDM dan Badan Lingkungan Hidup). Dimana keduanya antara pemerintah desa dan daerah adalah saling berkerja sama dalam birokrasi dan peraturan namun disini peneliti akan menjelaskan bagaimana langkah stakeholder dalam pengelolaan kawasan Karst ini. Sampai saat ini pengelolaan masih belum terlaksana sama sekali tentang pengelolaan potensi sumber daya alam dikarenakan kualitas sumber daya alam yang masih belum mencapai dalam hal tersebut.

Data fokus penelitian ini diperkuat dengan metode penelitian dengan wawancara dengan *stakeholder* Desa yaitu dengan kepala desa Ibu Suliyah.

Berikut hasil penjelasan wawancara pada beliau:

Menanggapi tentang pertanyaan tadi, bagaimana pengelolaan potensi Karst sumber mata air. Didesa banjarejo ini masyarakat maupun pemerintah masih belum bisa memanfaatkan potensi yang ada seperti potensi sumberdaya alam yaitu sumber air. Biasanya sumber air disini mengalami kekeringan, sehingga warga kesulitan mencari air apabila pada saat musim kemarau. Masih belum ada bantuan dari pemerintah untuk mengatasi kekeringan pada saat musim kemarau ini. Dusun sumberceleng dan pasar pon tiap tahun mengalami masalah tersebut, saya rasa pemerintah desa butuh tenaga ahli dalam mengatasi masalah ini.

Sumber: hasil wawancara di balai desa banjarejo pada 28 Juli 2015

Hasil wawancara diatas mengindikasikan bahwasannya pengelolaan potensi sumberdaya alam masih sangat minim, atau bahkan masih belum dikelola.

Karena terkendala masalah sumberdaya manusia.



Pengelolaan potensi gua juga masih belum terkelola dengan baik, bahkan penambangan batu gamping di wilayah ini masih marak dilakukan oleh warga. Pemanfaatan potensi satu ini hanya dilakukan oleh penggiat penelusur gua (*Caver*) dari berbagai komunitas dan para pencinta alam di Malang. Berikut hasil wawancara mengenai potensi pengelolaan dari sisi guanya oleh kepala desa Ibu Suliyah:

Potensi gua disini sangat banyak, banyak warga yang mengetahuinya, namun masyarakat disini tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk pemanfaatan potensi ini. Mereka sering mengambil hasil gua seperti memburu sarang walet dan kelelawar untuk dijual. Tetapi banyak juga mahasiswa kesini untuk menelusuri gua, kata mereka gua disini banyak dan didalamnya bagus. Mungkin ini juga bisa jadi alternatif pengelolaan potensi guanya.

Sumber: hasil wawancara di balai desa Banjarejo pada 28 Juli 2015

Dengan hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisa bagaimana kondisi sumber daya manusia yang masih belum mampu mengoptimalkan potensi yang ada. Didukung pula dengan kendala dengan masalah fasilitas seperti jalan dan fasilitas lainnya.

Penambangan batu gamping Golongan C juga masih banyak dilakukan, ini dilakukan oleh beberapa warga di desa karena kebutuhan ekonomi dan kebutuhan pekerjaan, berikut hasil wawancara tentang pemanfaatan gua dan sumber mata air oleh Bapak Sukadi (56 tahun) warga Dusun Sumber Celeng:

Pekerjaan saya sehari-hari ya menambang batu untuk dijadikan batu gamping, prosesnya juga lumayan berat, harus cari batu untuk dikumpulkan, butuh kayu bakar juga untuk membakar batu supaya cepat matang. Kalo pemanfaatan gua saya tidak tahu, tapi warga disini sering masuk gua lowo untuk mengambil sarang walet dan kampret (kelelawar)

untuk dijual. Kalau air disini ambil air lewat pipa, terkadang juga ambil dari sumur. Kalau musim kemarau air disini sulit juga didapat.

Sumber: hasil wawancara pada warga dusun sumberceleng pada 28 juli 2015

Dari hasil diatas didapat bahwa pengelolaan serta pemanfaatan gua dan sumber mata air masih sangat minim, mengingat sumber daya alam juga minim. Banyak warga desa memilih untuk bekerja menjadi tukang bangunan dan petani. Padahal potensi desa ini berlimpah. Masalah disini ketika musim kemarau warga kekurangan air karena sumur sudah surut, jadi warga mengambil air jauh di sumber air maupun sungai bawah tanah jauh dari perkampungan.

Potensi dan hambatan didapatkan dari hasil RPJMDes desa Banjarejo, berbagai data yang masuk kemudian untuk ditarik sebagi potensi dan hambatan pembangunan Desa Banjarejo. Dari sini tergambar dan teridentifikasi bahwa desa banjarejo memiliki potensi sangat besar. Baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamn. Akan tetapi masyarakat sendiri masih belum mampu menggali atau memberdayakan semua potensi yang ada dikarenakan sumberdaya manusianya masih kurang sehingga untuk memanfaatkan potensi yang ada sering kurang tepat atau belum maksimal. Hal ini berakibat pemenuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat masih belum terpenuhi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Hal ini terjadi karena belum teratasinya berbagai hambatan dan tantangan yang ada. (RPJMDes desa Banjarejo tahun 2015-20120:17)

## 2. Pengelolaan daerah pesisir/laut desa Banjarejo.

Pengelolaan daerah pesisir/laut didesa banjarejo ini masih minim, mengingat observasi yang dilakukan oleh peneliti. Potensi pesisir didesa ini



memiliki 2 pantai dan 1 sungai hilir (kondang) yakni pantai bantol, pasir panjang dan kondang Blimbing. Ketiga potensi tersebut masih belum dikelola oleh pemerintah setempat padahal potensi ini sangat berpotensi untuk wisata maupun hasil lautnya. Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu nelayan pantai Bantol yakni Bapak Mahoni (34 tahun) warga dusun sumber celeng:

Potensi disini saya rasa sangat banyak ya dilihat saja dari gua terus pantai, laut dan sungai blimbing ini. Namun pemerintah disini masih belum bisa mengembangkannya buktinya jalan masih rusak, fasilitas nelayan juga ada walaupun ada bantuan perahu satu buah dan satunya lagi punya warga sendiri, memungkinkan juga kalau kondang Blimbing dan pantai Bantol disini jadi objek wisata. Tiap hari libur banyak para wisatawan lokal kesini juga.

Sumber: hasil wawancara di pantai Bantol pada 29 Juli 2015.

Hasil wawancara diatas dengan warga dusun sumbercelang yang berprofesi sebagai nelayan bahwasanya masalah atau kendala yang dihadapi saat ini adalah fasilitas penukung untuk kegiatan atau mata pencaharian warga dirasa masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Hasil wawancara dengan kepala desa mengenai pemanfaatan potensi pesisir/laut dengan ibu Suliyah:

Pemanfaatan laut terkait dengan para nelayan maupun objek wisata di desa ini masih belum terlaksana sperti fasilitas jalan menuju lokasi, fasilitas lainnya seperti TPI (tempat pelelangan ikan) dengan fasilitas dengan apa adanya itupun dari pemerintah masih dapat bantuan satu buah perahu. Dan pemanfaatan pariwisata pantai dan kondang blimbing masih belum dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Sumber: hasil wawancara di pantai Bantol pada 29 Juli 2015.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara serta observasi lapangan oleh peneliti bahwasannya kendala pemanfaatan potensi yang ada adalah factor fasilitas dan sumberdaya manusia untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah



tersebut. Sector pariwisata seharusnya juga dapat diwujudkan mengingat potensi yang ada sangat banyak. Pengelolaan secara lestari dari segi potensi gua dan sumber mata air dari pemerintah desa juga masih belum ada larangan terkait pertambangan warga desa mengingat dan menimbang kebutuhan ekonomi warga desa Banjarejo itu sendiri.

## **b. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Pemerintah Daerah**

### **1. Pengelolaan Gua dan Sumber Mata air (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral)**

Data fokus penelitian disini adalah kecamatan Donomulyo serta dinas energi sumberdaya dan mineral kabupaten malang sebagai instansi dalam pengelolaan.

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral nomor : 1456 K/20/Mem/2000 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, bahwa Klasifikasi kawasan Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Kawasan Karst Kelas I, Kawasan Karst Kelas II, dan Kawasan Karst Kelas III.

Pada Pasal 12

1) Kawasan Karst Kelas I merupakan kawasan yang memiliki salah satu, atau lebih kriteria berikut ini :

- a. Berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi:

- b. Mempunyai gua-gua dan sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya membentuk jaringan baik mendatar maupun tegak yang sistemnya mencukupi fungsi hidrologi dan ilmu pengetahuan;
- c. Gua-guanya mempunyai speleotem aktif dan atau peninggalan-peninggalan sejarah sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata dan budaya;
- d. Mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi sosial, ekonomi, budaya serta pengembangan ilmu pengetahuan.

2) Kawasan Karst Kelas II merupakan kawasan yang memiliki salah satu atau semua kriteria berikut ini :

- a. Berfungsi sebagai pengimbu air bawah tanah, berupa daerah tangkapan air hujan yang mempengaruhi naik-turunnya muka air bawah tanah di kawasan Karst , sehingga masih mendukung fungsi umum hidrologi;
- b. Mempunyai jaringan lorong-lorong bawah tanah hasil bentuk sungai dan gua yang sudah kering, mempunyai speleotem yang sudah tidak aktif atau rusak, serta sebagai tempat tinggal tetap fauna yang semuanya memberi nilai dan manfaat ekonomi.

(3). Kawasan Karst Kelas III merupakan kawasan yang tidak memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pemerintah kabupaten malang khususnya dinas yang terkait yakni dinas ESDM kabupaten malang, sudah menetapkan tentang pembagian golongan bahan galian. Program pemerintah bersumber dari dinas ESDM ini sudah dilakukan dengan sosialisasi dan penerapan peraturan pada tingkat kecamatan, namun



informasi pada tiap daerah masih belum diaplikasikan dengan baik dengan melihat berbagai pertimbangan dari segi ekonomi dan lingkungannya.

Berikut hasil wawancara dari dinas ESDM dengan staff bagian Geologi, Bapak Nugroho:

Kebijakan pemerintah mengenai perlindungan kawasan Karst yakni kebijakan maupun perda kabupaten malang sebenarnya sudah ada namun secara penerapannya masih belum berjalan sesuai harapan dinas ESDM. Memang masih banyak pertambangan bahan galian golongan A, B dan C. sosialisasi dengan pemerintah kabupaten serta kecamatan sudah pernah dilaksanakan.

Sumber: hasil wawancara di kantor dinas ESDM kabupaten malang pada 20 Februari 2016

Dengan hasil wawancara diatas, didapat bahwa undang-undang maupun peraturan menteri ESDM sebenarnya sudah ada, namun penerapan sampai saat ini ada beberapa namun tidak sesuai harapan.

Dengan adanya kebijakan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Karst dan peraturan menteri energi dan sumberdaya mineneral no 17 tahun 2012 pada Bab II Pasal 2 dengan tujuan:

1. Melindungi kawasan bentang alam Karst berfungsi sebagai pengatur alami tata air
2. Melestarikan bentang alam Karst yang memiliki keunikan dan nilai ilmiah sebagai objek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan
3. Mengendalikan pemanfaatan bentang alam Karst

Langkah yang dilakukan pemerintah terkait pengelolaan potensi bahan galian diwilayah Karst dan sumber mata air dirasa masih belum mencapai visi dan misi serta tujuan pengelolaan Karst oleh dinas ESDM kabupaten Malang, dengan diperkuat dengan hasil wawancara dengan staff bagian pertambangan Bapak Nugroho:

“ Mas harus tau perbandingan pariwisata di daerah lain seperti gua Pindul Jogjakarta, disana kalo pengelolaan Goa nya sudah bagus masyarakatnya



pun juga sudah siap untuk meladeni para wisatawan, nanti kalo udah kesana tau perbandingannya disini, di kabupaten malang. Kalo tentang wisata hubungannya dengan dinas pariwisata, begitu juga dampaknya nanti di bada Lingkungan Hidup kabupaten malang.

Sumber: hasil wawancara di kantor dinas ESDM kabupaten malang pada 20 Februari 2016

Maka seharusnya pemerintah kabupaten malang harus mengaplikasikan kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan potensi kawasan Karst secara lestari yang tertera pada peraturan menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2102 tentang penetapan bentang alam Karst.

Dengan mencermati hasil review terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan perkembangan Capaian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang sampai tahun 2013 yang didasari atas Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2011-2015 serta hasil kajian atas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2014-2015, maka rencana program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut :

1. Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatannya adalah:
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
  - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
  - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
  - f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
  - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan.
- j. Penyediaan Makanan dan Minuman.
- k. Rapat–Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
  1. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
2. Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatannya

adalah:

- a. Pengadaan Mebeleur.
- b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatannya

adalah :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
4. Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan adalah:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
5. Program: Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, dengan kegiatannya adalah:

- a. Sosialisasi Regulasi mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
- b. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
- c. Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi Dibidang Pertambangan
- d. Studi Potensi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Pertambangan Batuan

6. Program: Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan, dengan kegiatannya adalah :

- a. Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat



- b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat
  - c. Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi
  - d. Percontohan Reklamasi Areal Bekas Tambang
7. Program: Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, dengan kegiatannya adalah :
- a. Pembangunan Jaringan Ketenagalistrikan
  - b. Monev dan pengawasan Ketenagalistrikan
8. Program: Pembinaan dan Pengawasan Migas, dengan kegiatannya adalah:
- a. Pengawasan, Pengendalian Distribusi dan Pengusahaan Migas
  - b. Monitoring dan evaluasi bidang MIGAS
9. Program: Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi Pembangunan/Pembuatan Konstruksi Biogas dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dengan kegiatannya adalah :
- a. Pembinaan dan Sosialisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
  - b. Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
  - c. Perencanaan Kampung Mandiri Energi (Kampung Unggulan Niaga
  - d. Industri Nuansa Gender – Emban Masyarakat Andalan Sejahtera / Kuning Emas.
  - e. Pembangunan / Pembuatan Konstruksi Energi Baru Terbarukan
  - f. Survei Identifikasi Potensi PLTM
10. Program: Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, dengan kegiatannya adalah
- a. Pembinaan di Bidang Air Tanah bagi Masyarakat dan Pengusaha





11. Program: Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan kegiatannya adalah :

- a. Pembangunan Sumur Bor
- b. Pengawasan Izin Pemanfaatan Air Tanah
- c. Pembangunan Konstruksi Pengaman Sumber Air
- d. Inventarisasi Potensi Air Tanah dengan Geolistik

b. Kabupaten Malang

Sumber mata air merupakan sumber daya alam yang sangat berharga dan mempengaruhi hajat hidup manusia. Begitu juga sumber mata air di desa banjarejo. Sumber air di desa banjarejo juga membawa banyak manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Dalam upaya pelestarian sumber mata air di desa Banjarejo, maka stakeholder pemerintah kabupaten malang khususnya badan lingkungan hidup digandeng untuk melestarikan hal tersebut.

Pelibatan stakeholder pemerintah kabupaten dengan badan lingkungan hidup sebagai berikut:

Tabel 4. Pelibatan stakeholder dalam pengelolaan Karst

No.	Program dan kegiatan	Penyelenggara	Stakeholder yang terlibat
1.	Pemetaan potensi kawasan Karst	IMPALA UB	Badan Lingkungan Hidup, Dinas ESDM kabupaten malang.
2.	Advokasi dan sosialisasi potensi Karst wilayah malang	Dinas ESDM kabupaten malang	Badan Lingkungan Hidup, dinas kelautan dan perikanan kabupaten

		malang
--	--	--------

Sumber: BLH kabupaten Malang, ESDM Kabupaten Malang 2014.

**2. Pengelolaan daerah Pesisir/Laut (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang)**

Peran serta dinas kelautan disini adalah merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Malang di bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malang bidang kelautan dan perikanan yang ingin dicapai, maka tujuan, kebijakan dan program pembangunan bidang kelautan dan perikanan tahun 2014 adalah :

1. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang berdaya guna dan berdaya saing.
2. Mewujudkan sumberdaya kelautan dan perikanan yang aman dan lestari.
3. Meningkatkan ketersediaan pangan asal ikan yang optimal dan memenuhi standar mutu.

**Tujuan**

1. Meningkatkan kemampuan berusaha dan kesiagaan terhadap bencana alam laut bagi masyarakat pesisir.
2. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan produktivitas usaha perikanan.
4. Meningkatkan sumberdaya manusia dan tingkat konsumsi ikan

Pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Malang bidang kelautan dan perikanan dengan tujuan, kebijakan, indikator kinerja utama dan program pembangunan bidang kelautan dan perikanan tahun 2014-2015 sebagai berikut :

Tabel 5. Sasaran, Kebijakan, IKU dan Program Tahun 2014-2015

Sasaran	Kebijakan	Program
Meningkatnya pemanfaatan usaha ekonomi mikro di	Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap	Program pengelolaan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil





kawasan pesisir dan persiapan terhadap ancaman bencana alam laut		
Meningkatnya jumlah kawasan pengelolaan perikanan bebas illegal fishing.	Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap	Program peningkatan pengawasan, pengendalian dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap	Program pengembangan perikanan tangkap
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan budidaya	Program pengembangan budidaya perikanan
Meningkatnya produksi ikan olahan.	Peningkatan distribusi, pasca panen dan nilai tambah produk perikanan.	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Meningkatnya konsumsi ikan per kapita	Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, kelembagaan kelompok, penyediaan data dan informasi	Program pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan

Sumber: Dinas kelautan dan perikanan kabupaten malang 2014.

### C. Analisa Data dan Pembahasan

#### 1. Kajian Potensi Kawasan Karst Desa Banjarejo.

Potensi Gua di desa Banjarejo dirasa banyak yakni memiliki tipe yang horisontal dan vertikal menurut morfologinya. Serta memiliki gua kering dan berair (sungai bawah tanah). Potensi sungai bawah tanah yang prospektif dikembangkan untuk kegiatan wisata salah satunya aliran bawah tanah yakni gua Lowo. Panjang sistem aliran bawah tanah yang panjang lorong gua tersebut memiliki panjang sekitar 900 meter dan dapat disusuri melalui jalur horizontal dan juga vertikal, karena memiliki 2 mulut gua. Sampai saat ini pemanfaatan gua tersebut hanya digunakan sebagai pertanian oleh warga desa Banjarejo. Disisi lain



gua ini memiliki ornamen yang indah, seperti stalagmit dan stalagtit yang terbentuk oleh pengendapan air di batuan kapur selama ribuan tahun lamanya.

Pada potensi daerah pesisir, potensi daya tarik wisata Karst desa Banjarejo memiliki segmen yang cukup menarik dan beragam, dominasi Karst di pesisir malang selatan yakni di kecamatan donomulyo. Terutama dalam penelitian ini tentang potensi desa Banjarejo yang memiliki 3 pantai yakni pantai kondang iwak, pantai bantol dan pantai pasir muncar. Pemanfaatan potensi sumber daya alam ini masih belum difungsikan oleh pemerintah setempat, padahal potensi alam ini sangat menarik apabila difungsikan dengan baik.

Alasan utama pemanfaatan potensi ini sangat kurang karena, kurang meratanya pembangunan infrastruktur serta pengelolaan oleh sdm yang masih lemah. Peran serta pemerintah dalam pemetaan potensi wilayah dirasa masih minim. Publikasi aktif dan promo wisata pesisir malang masih kurang dalam pelaksanaannya. Berikut beberapa kelemahan dalam pengelolaan wilayah Karst malang:

Sebagai mana yang disebutkan mengenai aset desa berdasarkan UU no.6 Tahun 2014 pada pasal 76 ayat 1 dan 2 adalah(Ayat 1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Namun setelah didapat data dari lokasi penelitian dirasa desa ini masih menggantungkan pendapatan dari sektor bahan galian tambang untuk potensi khas Karst. Dan pendapatan yang diperoleh dari sektor laut/pantai masih belum

dimanfaatkan dengan baik. Potensi ekowisata pun juga belum terkelola dan terlaksana dengan baik. Berikut data pendapatan asli desa pada:

Tabel. 6. Data Dana Anggaran Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Banjarejo Tahun Anggaran 2011-2015

No.	Tahun	Pendapatan ADD dan perimbangan lainnya	Pendapatan Asli Desa (Rp)
1.	2011	1.301.127.500	173.100.000
2.	2012	299.476.000	190.600.000
3.	2013	591.642.000	183.855.500
4.	2014	1.295.827.500	178.400.000
5.	2015	837.556.772	-

Sumber : Arsip data dana anggaran dan belanja desa pemerintah desa banjarejo tahun anggaran 2011-2015.

Dilihat dari data dana anggaran dan belanja desa pemerintah desa banjarejo tahun anggaran 2011-2015 bahwa data didapat pengelolaan potensi wilayah masih belum terlaksana dengan baik. Dapat dilihat dari kebergantungan dana dari pemerintah yang lebih cenderung menggunakan dana alokasi. Dilihat dari trend pendapatan asli desa dengan rata-rata pendapatan Rp. 181.488.875,- yang berasal dari pajak, pasar desa, swadaya dan gotong-royong. Jadi dapat dianalisis bahwa pengelolaan serta pemanfaatan potensi sumberdaya alam masih belum dihasilkan.

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pengelolaan Potensi Desa Banjarejo

### A. Desa Banjarejo

1. lemahnya Sumber daya manusia untuk mengelola kawasan Karst di desa Banjarejo.

Sampai saat ini pengetahuan masyarakat desa Banjarejo tentang kawasan Karst dan nilai strategis kepariwisataannya masih belum diketahui oleh berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat pelaku wisata. Terbatasnya pengetahuan tentang kawasan Karst dan nilai strategis kawasannya menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pengembangan kawasan Karst (gua, mata air dan pesisir pantai) sebagai daerah tujuan wisata.

Terkait dengan hal tersebut, maka perlu penyebaran informasi kawasan Karst melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi termasuk juga kegiatan pengenalan lapangan (*field trip*), yang sasaran nya pemerintah daerah, murid murid sekolah, guru guru mata pelajaran yang berkaitan selaku masyarakat pelaku wisata dan media cetak serta elektronik yang dilakukan secara berkelanjutan.

2. Kemampuan sumberdaya manusia untuk mengelola tujuan wisata Karst desa Banjarejo.

Terbatasnya sumberdaya manusia untuk mengelola kawasan Karst di malang selatan saat ini masih sangat terbatas, padahal untuk mengelola kawasan Karst sebagai dayatarik wisata diperlukan sumberdaya manusia yang memadai dan paham tentang karakter dan daya dukung lingkungan kawasan Karst tersebut. Mengingat kawasan Karst adalah kawasan yang mudah terdegradasi lingkungannya, maka kebutuhan sumberdaya manusia yang memadai untuk mengelola kawasan Karst sebagai dayatarik wisata menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

Terkait dengan hal tersebut perlu pembinaan dan pelatihan. Khusus untuk mengelola kegiatan wisata dikawasan Karst Malang Selatan. Beberapa pelatihan





dan pembinaan yang diperlukan meliputi pelatihan pengelolaan daya tarik wisata minat khusus, pelatihan pemandu kegiatan serta kegiatan susur gua, ekspedisi gua, wisata alam bahari dan lainnya.

### 3. Informasi potensi sosial budaya masyarakat kawasan Karst

Hingga saat ini potensi dayatarik wisata kawasan Karst yang sudah diketahui dan terinformasikan masih terbatas pada sisi keunikan morfologinya, sementara itu potensi dayatarik wisata lain seperti potensi sosial budaya masyarakat belum tergali secara lengkap. Potensi sosial budaya yang ada dimasyarakat Karst perlu juga untuk diketahui dan dikaji dengan baik, karena sesungguhnya potensi dan nilai sosial budaya masyarakat kawasan Karst cukup banyak, serta memiliki keunikan tersendiri. Apabila potensi tersebut dapat dikemas dan dipadukan dengan potensi morfologinya menjadi suatu produk wisata, maka akan memperkaya dayatarik wisata kawasan Karst secara konservatif.

### 4. Fasilitas pendukung kegiatan wisata kawasan Karst

Fasilitas pendukung kegiatan wisata dikabupaten malang secara umum masih memprihatinkan. Beberapa keluhan wisatawan saat berkunjung di kabupaten malang , seperti hal-hal berikut:

- a. Sarana jalan ketempat lokasi wisata masih belum memadai, serta rambu-rambu lalu lintas yang masih memprihatinkan dan tidak merata
- b. Terbatasnya pusat informasi wisata dari pihak pemerintahan.
- c. Daya tarik wisata terkendala dengan listrik yang tidak sampai dilokasi atau destinasi wisata.

- d. Pengelolaan sumberdaya laut yang masih menggunakan alat alat tradisional untuk memperoleh hasil laut.

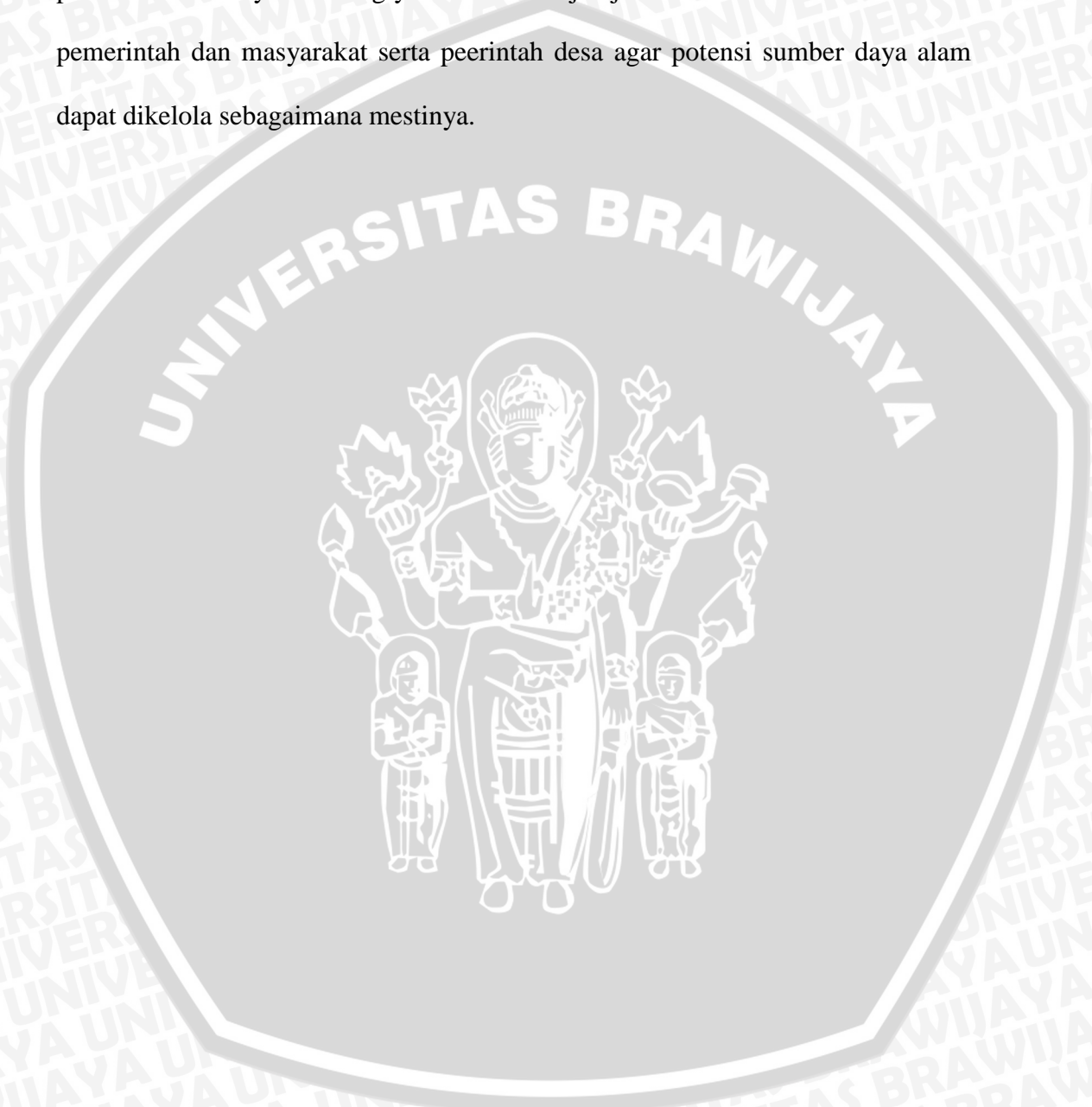
## **B. Pemerintah Daerah (Kecamatan Donomulyo Dan Desa Banjarejo)**

### **Dan Keterkaitan Dinas ESDM Dan Kelautan Terkait Tentang Pengelolaan Potensi Kawasan Karst.**

1. Kemampuan SDM atau kapasitas internal pemerintah kabupaten malang masih belum memadai. Pemerintah dengan dinas terkait masih belum memadai dalam ekologi kawasan Karst yakni gua, sumbermata air dan wilayah pesisir.
2. Kemampuan SDM yang masih berorientasi pada segi administrative dan juga budget oriental. Artinya pemkab pegawai staff dan dinas masih terpaku pada program yang ditetapkan. Padahal masih banyak hal-hal yang semestinya harus dilakukan.
3. Masih belum adanya sinkronisasi pada program yang dicanangkan di dinas dinas terkait. Seperti RENSTRA dengan pelaksanaan semestinya.
4. Stakeholder yang ada belum terlalu terlibat dalam upaya pengelolaan potensi kawasan Karst (Gua, Sumber Mata Air dan wilayah pesisir). Namun sedikit yang ikut dalam pengelolaan sumber daya ini.
5. Banyak kasus penambangan batu gamping yang diambil dengan sisi ekonominya saja tanpa melihat dari sisi ekologi lingkungan untuk mewujudkan lingkungan yang lestari.
6. Lemahnya tindakan hukum bagi para perusak ekologi Karst untuk tangkapan akuifer ami yakni sebagai penyimpanan air alami. Masih banyak pemakluman, hal ini perlu tindakan tegas dari pemerintah.



7. Koordinasi pemangku kepentingan masih belum berjalan. Banyaknya stakeholders merupakan suatu potensi atau daya dukung terhadap pengelolaan potensi karst wilayah Malang yakni Desa Banjarejo. Perlu wadah sosialisasi antar pemerintah dan masyarakat serta pemerintah desa agar potensi sumber daya alam dapat dikelola sebagaimana mestinya.





## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Banyak aktivitas yang berpotensi menyebabkan kerusakan sumberdaya air di sungai bawah tanah seperti pemanfaatan luweng sebagai tempat sampah, pemanfaatan lahan di sekitar luweng untuk pertanian yang berpotensi menyebabkan pencemaran serta kondisi *sanitasi grey water* dan *black water* yang kurang ramah lingkungan.
2. Perlu diadakan/ dibentuk program desa aktif wisata yang berbasis masyarakat dan lingkungan dengan kemandirian masyarakat desa, dengan menyertakan lembaga desa seperti Karang Taruna, paguyuban desa ataupun lembaga sosial lainnya.
3. Pengelolaan kawasan karst yang masih kurang dirasa menyebabkan ketergantungan Desa Banjarejo ini terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan yang masih minim dirasa pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.
4. Diperlukan sosialisasi dan pendidikan terhadap masyarakat untuk dapat memberikan pemahaman tentang sungai bawah tanah, karakteristik hidrologi kawasan karst, hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan sumberdaya air sungai bawah tanah serta hal-hal yang dapat dilakukan

untuk mengkonservasi sumberdaya air di sungai bawah tanah. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah yang dibantu oleh lembaga sosial masyarakat dan akademisi.

5. Program Pemerintah Daerah tentang pengelolaan potensi daerah pesisir, dengan pengembangan kepariwisataan karst dengan yang dimaksud adalah Goa dan sumber mata air, serta potensi lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan kedepannya, seperti halnya pengelolaan di Goa Gombong pegunungan karst Gunung Kidul Jogjakarta.
6. Para pemangku kepentingan masih belum berperan aktif dalam pemanfaatan serta pengelolaan potensi secara lestari.
7. Pengelolaan potensi karst masih belum terintegrasikan dengan baik, karena ada banyak faktor yang mempengaruhinya.
8. Faktor penghambat dalam pengelolaan kawasan kars desa banjarajo adalah:
  - e. Sarana jalan ketempat lokasi wisata masih belum memadai.
  - f. Terbatasnya pusat informasi wisata dari pihak pemerintahan.
  - g. Pengelolaan sumberdaya laut yang masih menggunakan alat alat tradisional untuk memperoleh hasil laut.
  - h. Dukungan dari pemerintah daerah tentang pemanfatan sumber daya alam pesisir masih minim.
9. Ada beberapa faktor prndukung dalam pengelolaan kawasan karst yakni

aktivis lingkungan dan organisasi yang mendukung pengelolaan kawasan karst.

## B. Saran

1. Perlu diadakan sosialisasi pengelolaan kawasan Karst pada masyarakat setempat yakni yang dimaksud adalah Desa dan Kecamatan.
2. Perlu diadakan *Integrated water resource management (IWRM)* dengan melibatkan stakeholder terkait. Seperti halnya pengelolaan di daerah Jogjakarta yang pengelolaannya sudah terintegrasikan dengan baik.
3. Pemerintah Desa Banjarejo Dan Pemerintah Daerah harus berkoordinasi secara aktif dan efisien melihat kelebihan potensi untuk meminimalisir beberapa faktor dalam pengelolaan kars dan pesisir.
4. Perlu penguatan kelembagaan desa seperti Karang Taruna dan lembaga lainnya, dengan pemberian sosialisasi, agar pengembangan sumber daya manusia dapat terwujud
5. Perlu diadakan Bhakti Desa dengan melibatkan seluruh potensi SDM baik lingkup akademisi maupun pemerintahan, agar potensi karst malang dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan pendapatan desa maupun daerah.
6. Perlu pengkajian khusus di bidang lainnya seperti sosial budaya, ciri khas daerah serta potensi-potensi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan Karst.



## DAFTAR PUSTAKA

akhmadfauji.2008. Cara penulisan latar belakang masalah dalam karya ilmiah.

Greenersmagz. 2013. Kawasan Karst Malang Terancam. Surabaya diakses di ([www.greenersmagz.com](http://www.greenersmagz.com)) pada tanggal 10 Desember 2014.

Hadari Nawawi dan Martini Hadari. 1995. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Halaman 66.

Hadari Nawawi. 1991. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Halaman 63.

Keputusan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 1456 .K/20/MEN/2000

Nazir. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 63.

Peraturan Menteri energi dan Sumberdaya Mineral No. 17 tahun 2012 tentang Penetapan Bentang Alam Karst

P. Joko Subagyo. 2006. *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*. Rineke Cipta. Jakarta. Halaman 1.

Peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031

Riwu. Josef. 1988. *Prospek pengembangan Otonomi daerah di negara republik Indonesia*. Fisipol Universitas Gadjah mada

Riwukaho, Josef, (2001), *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sabarno, Hari. 2008. *Memandu Otonomi Daerah Demi menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta.

Siagian, Sondang P.1992. *Kerangka dasar Ilmu administrasi*. Jakarta:PT Rineka Cipta.

Sunarjo, Umang.1984. *Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*. Bandung

Suryono, Agus.2001. *Budaya Birokrasi Pelayanan Publik*. Jurnal Administrasi Negara Vol.1 Malang: Fakultas Ilmu Administrasi UNIBRAW

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Workshop ekosistem karst.2 011. berbagi informasi untuk meningkatkan upaya konservasi kawasan karst gunung sewu dan jonggarangan. Yogyakarta.

Zauhar, Soesilo. 2001. *Administrasi pelayanan Publik: Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 1 No.2 Malang

RPJMDes Banjarejo. 2015. Rencana pembangunan jangka menengah Desa. Desa banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.



**DOKUMENTASI PENDATAAN POTENSI KAWASAN KARST**

**DESA BANJAREJO, KECAMATAN DONOMULYO,**

**KABUPATEN MALANG**

Nama potensi : Gua Kepuh, Danau/Telaga

Desa/dusun : Sumber Celeng

Hari/tanggal survey : Sabtu, 14 Desember 2014

**Foto Gua dan Potensi**









Titik Koordinat	Pemanfaatan : Vegetasi : Aksesibilitas :
-----------------	--





**DOKUMENTASI PENDATAAN POTENSI KAWASAN KARST**

**DESA BANJAREJO, KECAMATAN DONOMULYO,**

**KABUPATEN MALANG**

Nama dokumentasi : Pantai Pasir Panjang dan dokumentasi Penelitian

Desa/dusun : Sumber Celeng

Hari/tanggal survey : Sabtu, 14 Desember 2014

**Foto Gua dan Potensi**







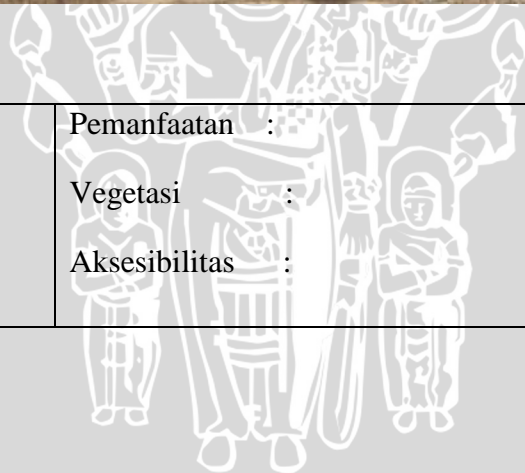


Titik Koordinat

Pemanfaatan :

Vegetasi :

Aksesibilitas :





**DOKUMENTASI PENDATAAN POTENSI KAWASAN KARST**

**DESA BANJAREJO, KECAMATAN DONOMULYO,**

**KABUPATEN MALANG**

Nama : Struktur Organisasi Desa Banjarejo

Desa/dusun : Sumber Celeng

Hari/tanggal survey : Sabtu, 14 Desember 2014

**Foto**





Lampiran Pendapatan Asli Desa Banjarejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.

Lampiran I Peraturan Desa  
 Nomor : Tahun 2013  
 Tanggal: April 2013.

PENJABARAN ANGGARAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2013

Kode Rekening	URAIAN	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Berkurang/ Bertambah
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan:			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa:	15.000.000	15.000.000	tetap
	Tanah Desa			
	Tanah Titik SARA			
	Tanah Suguhi Dayoh			
	Tanah Bongkok			
	Tanah Bando Desa			
	Tanah Kokoan			
	Tanah Timbul			
	Tanah Panganan			
	Tanah Pembelian Desa			
1.1.2.2	Pasar Desa		900.000	
	Pasar Hewan			
	Jembatan Perahu			
	Bangunan Desa			
	Pelangan Ikan yang dikelola Desa			
	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi:	76.000.000	66.355.500	Berkurang
1.1.4	Hasil Gotong Royong	25.000.000	25.000.000	tetap
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.2	Bagi Hasil Pajak:			
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota			
1.2.2	Bagi hasil PBB			
1.2.3	Upah pungut PBB	3.600.000	3.600.000	tetap
1.2.4	Hediah			
	Bagi Hasil Retribusi			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah:			
1.4.1	ADD	175.000.000	175.000.000	tetap
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat		165.166.000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		120.000.000	
1.5.3.1	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	124.476.000	124.476.000	tetap
1.5.3.2	Dana Bantuan Penyelenggaraan Pilkadaes		7.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten/kota			
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan			

2.1 BELANJA				
2.1.1	Belanja langsung	71.100.000	65.750.500	bertambah
2.1.2	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2.1.3	Pemberian tunjangan penghasilan Perangkat Desa	5.000.000	5.000.000	tetap
2.1.4	Biaya Operasional pengendalian PTKPD dan Bendahara Desa	4.000.000	4.000.000	tetap
2.1.5	Rekening listrik dan air	1.000.000	1.250.000	bertambah
2.1.6	Pengadaan Alat Tulis Kantor	7.800.000	5.000.000	berkurang
2.1.7	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan	4.000.000	4.000.000	tetap
2.1.8	Pembenah Kantor Desa/Balai Dukuh	36.500.000	20.000.000	berkurang
2.1.9	Pemeliharaan kantor Desa	13.000.000	13.250.500	
2.2	Belanja tak langsung			
2.2.1	Penanggulangan Keniskinian	3.500.000		
2.2.2	Bantuan operasional LPMD	2.000.000	2.000.000	tetap
2.2.3	Bantuan operasional BPD	2.000.000	2.000.000	tetap
2.2.4	Bantuan Operasional PKK	7.000.000	7.000.000	tetap
2.2.5	Peningkatan stabilitas keamanan			
2.2.6	Bantuan Operasional Lembaga RT dan RW	22.500.000	11.250.000	berkurang
2.2.7	Peningkatan Derajat Kesehatan	2.000.000		
2.2.8	Peningkatan stabilitas keamanan	3.100.000	3.100.000	tetap
2.2.6	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	8.000.000	3.000.000	bertambah
2.2.7	Peningkatan Pengamalan Kehidupan Keagamaan	8.000.000	3.000.000	bertambah
2.2.8	Pembangunan Infra Struktur Pedesaan	64.400.000	104.400.000	bertambah
2.2.9	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap	124.478.000	124.478.000	tetap
2.2.10	Swadaya dan partisipasi masyarakat	78.000.000	88.365.000	bertambah
2.2.11	Gotong royong masyarakat	96.000.000	96.000.000	tetap
2.2.12	Perjalanan Dinas			
2.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat			
2.3.1	Rabat Beton Pasar Pon Rt, 22,23 dan 24 ( PNPPI )		165.165.000	bertambah
2.4	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
2.4.1				
2.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
2.5.1	Aspal jalan Dusun Putukrejo Rt, 23 dan 33		120.000.000	bertambah
2.5.2				
2.5.3				
Jumlah Belanja ( 2.1 + 2.2 )		490.078.000	775.497.500	bertambah
SURPLUS/(DEFISIT)				

Bupati Bawean



LAPORAN APBDDES

LAMPIRAN I PERATURAN  
NOMOR  
TANGGAL

PENJABARAN ANGGARAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2012

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)
1	2	3
1	PENDAPATAN	
1,1	Pendapatan Asli Desa	
1,1,1	Hasil Usaha Desa	
1,1,2	Hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan	
1,1,2,1	Tanah Kas Desa	5.000.000
	Tanah Desa	1.500.000
	Tanah Bengkok	4.000.000
	Pasar Desa	
1,1,2,2	Pasar Desa	
	Lain-lain Kekayaan Milik Desu	
1,1,3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	70.000.000
1,1,4	Hasil Gotong royong	90.000.000
1,2	Bagi Hasil Pajak	
1,2,1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota	
1,2,2	Bagi Hasil PBB	2.600.000
1,2,3	Upah Pungut	
1,3	Bagi Hasil Restribusi	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	431.813.500
1,4,1	Alokasi Dana Desa ( ADD )	175.000.000
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota	
1,5,1	Bantuan Pembangunan dari Pemerintah	214.818.000
1,5,2	Bantuan Langsung Tunai	
1,5,3	Bantuan Sembako untuk Warga Miskin	107.328.000
1,5,4	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	150.000.000
1,5,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	108.000.000
1,5,3,1	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	114.168.000
1,6	Sumbangan Pihak Ketiga	
1,6,1	Sumbangan dari Konsumen Listrik	
1,6,2	Sumbangan dari BUMDes	

KEPALA DESA  
BANTUL  
YOGYAKARTA



pendapatan 1.474.227.500

1	2	3
2	BELANJA	
2.1.1	Belanja Langsung	
2.1.2	Belanja Pegawai Honorarium	
2.1.3	Biaya Operasional PTPKD dan Bendahara Desa	4.000.000
2.1.4	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000
2.1.5	Pembayaran Rekening Listrik / Air / Telepon	500.000
2.1.6	Pengadaan dan Pemeliharaan Inventaris kantor	5.000.000
2.1.7	Pemberian penghasilan perangkat Desa	19.000.000
2.1.8	Penyelenggaraan Rapat	2.000.000
2.1.9	Perjalanan dinasKepala Desa dan Perangkat Desa	
2.1.10	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan	5.000.000
2.1.9	Pembangunan Infrastruktur pedesaan	90.900.000
2.2	Belanja Tidak Langsung	
2.2.1	Biaya operasional Penyelenggaraan Pemerintahan	
2.2.2	Penanggulangan kemiskinan	5.000.000
2.2.3	Bantuan Operasional LPMD	2.000.000
2.2.4	Bantuan Operasional PKK	7.000.000
2.2.5	Bantuan Operasional BPD	2.000.000
2.2.6	Belanja Pegawai / Penghasilan tetap	114.168.000
2.2.7	Bantuan Operasional Lembaga RT dan RW	22.500.000
2.2.8	Peningkatan Derajat Kesehatan	2.000.000
2.2.9	Pembinaan Organisasi Pemuda	3.000.000
2.2.10	Peningkatan Kehidupan Keagamaan	10.000.000
2.2.11	Peningkatan Stabilitas Keamanan	3.100.000
	Swadaya dan Partisipasi	70.000.000
	Gotong royong Masyarakat	90.000.000
	Jumlah	462.168.000

1 2 3





**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BANJAREJO  
TAHUN ANGGARAN 2015**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	ISY
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1 1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
<b>1 2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>837.556.772</b>	
1 2 1	Alokasi Dana Desa	509.801.000	
1 2 2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah	23.296.772	
1 2 3	Dana Desa	304.459.000	
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten		
<b>1 3</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>837.556.772</b>	
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>2 1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>251.305.000</b>	30%
<b>2 1 1</b>	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>173.790.000</b>	RAJ 1
2 1 1 1	Belanja Pegawai	173.790.000	
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	144.000.000	34%
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	19.500.000	
	- Tunjangan BPD	10.290.000	
<b>2 1 2</b>	<b>Operasional Perkantoran</b>	<b>32.097.000</b>	RAJ 2
2 1 2 1	Belanja Barang dan Jasa	17.147.000	
	- Alat Tulis Kantor	2.135.000	
	- Pakaian Dinas dan Atribut	3.850.000	
	- Alat dan Bahan Kebersihan	412.000	
	- Perjalanan Dinas	2.100.000	
	- Air, Listrik dan Telepon	1.200.000	
	- Pengandaan	100.000	
	- Benda Pos	150.000	
	- Makan minum rapat	7.200.000	
2 1 2 2	Belanja Modal	14.950.000	
	- Komputer	3.500.000	
	- Laptop	4.750.000	
	- Printer	1.000.000	
	- Kamera	1.500.000	
	- Kursi	3.000.000	
	- Kursi lipat	1.200.000	
<b>2 1 3</b>	<b>Pemeliharaan alat dan gedung kantor</b>	<b>33.085.000</b>	RAJ 3
2 1 3 1	Belanja Barang dan Jasa	33.085.000	
	- Pemeliharaan gedung kantor	29.285.000	
	- Pemeliharaan alat kantor	3.800.000	
<b>2 1 4</b>	<b>Operasional BPD</b>	<b>1.948.000</b>	RAJ 4
2 1 4 1	Belanja Barang dan Jasa	1.948.000	
	- Alat Tulis Kantor	198.000	
	- Perjalanan Dinas	1.750.000	
<b>2 1 5</b>	<b>Evaluasi dan Peleporan</b>	<b>10.475.000</b>	RAJ 5
2 1 5 1	Belanja Barang dan Jasa	10.475.000	
	- Alat Tulis Kantor	625.000	
	- Perjalanan dinas	2.400.000	
	- Honor penatausahaan keuangan	5.700.000	
	- Pengandaan	1.750.000	
<b>2 2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>345.344.500</b>	
<b>2 2 1</b>	<b>Rabat Beton Dusun Nampurejo Rt. 40 s/d 41</b>	<b>83.810.000</b>	RAJ 6
2 2 1 1	Belanja Pembiayaan		



KODE	URAIAN	ANGGARAN	SKY
	- Mesin pompa air	2.000.000	
2 2 1 2	BELANJA MODAL	58.010.000	
	Belanja Material	58.010.000	
	- semen PC 40 kg	28.200.000	
	- Pasir	9.975.000	
	- koral	18.800.000	
	- Begesting	1.000.000	
	- paku	30.000	
	- benang	5.000	
2 2 2	<b>Rabat Beton Dusun Erajan Rt.01 - Rt.03</b>	<b>92.654.500</b>	RAJ 1
2 2 2 1	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000	
	Upah Kerja	17.000.000	
	- Tukang	7.000.000	
	- Kuli	10.000.000	
	Honor	2.200.000	
	- Pelaksana Kegiatan	200.000	
	- Pengawas	2.000.000	
	Belanja Sewa Alat	10.000.000	
	- Mesin Pengaduk	8.000.000	
	- Mesin pompa air	2.000.000	
2 2 2 2	BELANJA MODAL	63.454.500	
	Belanja Material	63.454.500	
	- semen Fe 40 kg	31.380.000	
	- Pasir	11.025.000	
	- koral	20.000.000	
	- Begesting	1.000.000	
	- paku	45.000	
	- benang	4.500	
2 2 3	<b>Rabat Beton Dusun Putukrejo Rt. 27 , Rt 28</b>	<b>83.810.000</b>	RAJ 2
2 2 3 1	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000	
	Upah Kerja	13.600.000	
	- Tukang	5.600.000	
	- Kuli	8.000.000	
	Honor	2.200.000	
	- Pelaksana Kegiatan	200.000	
	- Pengawas	2.000.000	
	Belanja Sewa Alat	10.000.000	
	- Mesin Pengaduk	8.000.000	
	- Mesin pompa air	2.000.000	
2 2 3 2	BELANJA MODAL	58.010.000	
	Belanja Material	58.010.000	
	- semen PC 40 kg	28.200.000	
	- Pasir	9.975.000	
	- koral	18.800.000	
	- Begesting	1.000.000	
	- paku	30.000	
	- benang	5.000	
2 2 4	<b>Rabat Beton Dusun Pasar Pon Rt. 20</b>	<b>85.070.000</b>	RAJ 3
2 2 4 1	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000	
	Upah Kerja	13.600.000	
	- Tukang	5.600.000	
	- Kuli	8.000.000	
	Honor	2.200.000	
	- Pelaksana Kegiatan	200.000	
	- Pengawas	2.000.000	
	Belanja Sewa Alat	59.270.000	
	- Mesin Pengaduk	8.000.000	
	- Mesin pompa air	2.000.000	
2 2 4 2	BELANJA MODAL	59.270.000	





KODE	URAIAN	ANGGARAN	REK
2 3	<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>	<b>68.233.272</b>	
2 3 1	<b>Pelatihan Anggota Lemas</b>	<b>11.750.000</b>	RAJ 20
2 3 1 1	Belanja Barang dan Jasa	11.750.000	
	- Honor Pelatih	800.000	
	- Konsumsi	3.200.000	
	- Uang saku	7.750.000	
2 3 2	<b>Bantuan Operasional Poskamling</b>	<b>2.500.000</b>	RAJ 21
2 3 2 1	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	
	- Cat tembok	675.000	
	- Cat kayu	500.000	
	- Kuas	500.000	
	- Lampu senter	375.000	
	- Bohlamp	450.000	
2 3 3	<b>Pembinaan Gotong Royong</b>	<b>47.500.000</b>	RAJ 22
2 3 3 1	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000	
	- Operasional LPMD	47.500.000	
2 3 4	<b>Pelaksanaan BBGRM</b>	<b>6.483.272</b>	RAJ 23
2 3 4 1	Belanja Barang dan Jasa	6.483.272	
	- Alat Tulis Kantor	135.272	
	- Penggandaan	48.000	
	- Konsumsi	6.300.000	
2 4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>172.674.000</b>	
2 4 1	<b>Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>52.000.000</b>	RAJ 14
2 4 1 1	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000	
	- Bantuan Operasional TP PKK	20.000.000	
	- Bantuan Operasional Karang Taruna	5.000.000	
	- Bantuan Operasional Kelompok Keserian	10.000.000	
	- Bantuan Operasional PAUD/TPQ	8.000.000	
	- Bantuan Operasional Posyandu	9.000.000	
2 4 2	<b>Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan masyarakat</b>	<b>36.600.000</b>	RAJ 15
2 4 2 1	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000	
	- Insentif guru TK/Paud	9.600.000	
	- Insentif kader kesehatan	27.000.000	
2 4 3	<b>Peningkatan kapasitas kehidupan beragama</b>	<b>15.250.000</b>	RAJ 16
2 4 3 1	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000	
	- Bantuan operasional tempat ibadah	10.000.000	
	- Insentif guru ngaji	5.250.000	
2 4 4	<b>Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>68.824.000</b>	RAJ 17
2 4 4 1	Belanja Barang dan Jasa	68.824.000	
	- Bantuan operasional penyaharan beras miskin	13.824.000	
	- Bantuan hibah Kambing, bergulir bagi warga miskin	15.000.000	
	- Pesterisasi rumah tidak layak huni warga miskin	40.000.000	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>837.556.772</b>	
	<b>SURPLUS / DEFISI</b>	<b>0</b>	
3	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3 1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>		
3 1 1	SILPA		
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan		
3 1 3	Hasil Kelayaan Desa yang dipisahkan		
	<b>JUMLAH</b>	<b>837.556.772</b>	
	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		
	Pembentukan Dana Cadangan		
	Penyertaan Modal Desa		
	<b>JUMLAH</b>	<b>837.556.772</b>	
3 2 1			

KABUPATEN MALANG  
 Disetujui oleh  
 Kepala Desa BAJAREJO

KABUPATEN MALANG  
 Disetujui oleh  
 Kepala Desa BAJAREJO

LAPORAN APBDES

LAMPIRAN I PERATURAN DESA

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL : 30 Januari 2014

PENJABARAN ANGGARAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	BERKURANG BERTAMBAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa			
1,1.1	Hasil Usaha Desa			
1,1.2	Hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan			
1,1.2.1	Tanah Kas Desa	5.000.000	5.000.000	
	Tanah Desa	1.500.000		
	Tanah Bengkok	4.000.000		
	Pasar Desa		900.000	
1,1.2.2	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1,1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	70.000.000	70.000.000	
1,1.4	Hasil Gotong royong	90.000.000	90.000.000	
1,2	Bagi Hasil Pajak			
1,2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota			
1,2.2	Bagi Hasil PBB	2.600.000	2.500.000	
1,2.3	Upah Pungut			
1,3	Bagi Hasil Restribusi			
1,4	Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	431.813.500		
1,4.1	Alokasi Dana Desa ( ADD )	175.000.000	175.000.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten			
1,5.1	Bantuan Pembangunan dari Pemerintah	214.818.000		
1,5.2	Bantuan Langsung Tunai			
1,5.3	Bantuan Sembako untuk Warga Miskin	107.328.000		
1,5.4	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	150.000.000		
1,5.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	108.000.000		
1,5.3.1	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	114.168.000	114.168.000	
1,6	Sumbangan Pihak Ketiga			
1,6.1	Sumbangan dari Konsumen Listrik			
1,6.2	Sumbangan dari BUMDes		1.500.000	
	Jumlah Pendapatan	1.474.227.500	459.068.000	





	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai Honorarium			
2.1.3	Biaya Operasional PTPKD dan Bendahara Desa	4.000.000	4.000.000	
2.1.4	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000	3.000.000	
2.1.5	Pembayaran Rekening Listrik / Air / Telepon	500.000	1.250.000	
2.1.6	Pengadaan dan Pemeliharaan Inventaris kantor	5.000.000	20.000.000	
2.1.7	Pemberian penghasilan perangkat Desa	19.000.000	17.500.000	
2.1.8	Penyelenggaraan Rapat	2.000.000		
2.1.9	Perjalanan dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa			
2.1.10	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan	5.000.000	5.000.000	
2.1.11	Penyusunan Profil Desa		2.000.000	
2.1.12	Pembangunan infrastruktur pedesaan	90.900.000	62.550.000	
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Biaya operasional Penyelenggaraan Pemerintahan			
2.2.2	Penanggulangan kemiskinan	5.000.000		
2.2.3	Bantuan Operasional LPMD	2.000.000	2.000.000	
2.2.4	Bantuan Operasional PKK	7.000.000	7.000.000	
2.2.5	Bantuan Operasional BPD	2.000.000	5.000.000	
2.2.6	Belanja Pegawai / Penghasilan tetap	114.168.000	114.168.000	
2.2.7	Bantuan Operasional Lembaga RT dan RW	22.500.000	28.000.000	
2.2.8	Peningkatan Derajat Kesehatan	2.000.000	2.000.000	
2.2.9	Pembinaan Organisasi Pemuda	3.000.000	3.000.000	
2.2.10	Peningkatan Kehidupan Keagamaan	10.000.000	3.000.000	
2.2.11	Peningkatan Stabilitas Keamanan	3.100.000	4.000.000	
2.2.12	Bantuan Operasional Kader Desa		4.500.000	
2.2.13	Bantuan Operasional KPMD		1.200.000	
	Bantuan operasional Ambulan Desa		9.900.000	
	Swadaya dan Partisipasi	70.000.000	70.000.000	
	Gotong royong Masyarakat	90.000.000	90.000.000	
	Jumlah	462.168.000	459.068.000	


  
 Mulyo Feli
   
 Kepala Desa
   
 Donorejo